

1. GETARI WISA
Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam
2. PAPA MODIS DALANG BATIK
Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis Dengan Metode Daur Ulang Menjadi Paving Block dan Batako Plastik
3. E-KINO
Aplikasi Elektronik Kinerja Organisasi (E-KINO) Reformasi Birokrasi
4. PEMBELA
Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Pengalaman Lapangan Anak
5. SI DIGIT
Sistem Disposisi Digital

Laporan Penelitian

MONITORING DAN EVALUASI INOVASI



BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT maha pencipta atas limpahan karunia-Nya, **LAPORAN PENELITIAN MONITORING DAN EVALUASI INOVASI** ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan pelaksanaan/ implementasi inovasi-inovasi di Kabupaten Balangan tahun 2021-2022, kendala dan permasalahan yang dihadapi selama implementasi program inovasi, mengukur efisiensi/ keberhasilan program dan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi program inovasi.

Penelitian ini disadari oleh penyusun masih banyak kekurangan karena keterbatasan tools/ alat/ metode dan indikator yang digunakan untuk mengukur, serta waktu pengukuran yang relatif masih singkat karena program baru berjalan selama 2 tahun. Alangkah baiknya kedepannya ditambahkan lagi indikator pengukuran dan waktu evaluasi supaya lebih terlihat lagi dampak dan manfaatnya (*impact*). Keterbatasan juga terjadi pada internal penyusun berupa waktu dan kemampuan, sehingga penyusun sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata penyusun menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan kepada seluruh pihak terlibat yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses penelitian ini. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Balangan, Desember 2022

Tim Penyusun

JF Peneliti Bappedalitbang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
C. Manfaat Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Inovasi sektor publik	6
B. Evaluasi Dampak	7
C. Pengukuran Dampak inovasi sektor publik.....	10
D. Kerangka Pikir.....	14
E. Operasionalisasi Konsep.....	15
III. METODE	18
A. Pendekatan Penelitian.....	18
B. Teknik Pengumpulan Data	18
C. Instrumen pengukuran.....	19
D. Kriteria Penentuan Sampling.....	19
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	20
IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN	23
1. GERAKAN CINTA TARI WARISAN SANGGAM (GETARI WISA).....	23
2. PENGELOLAAN DAN PEMILAHAN LIMBAH NON MEDIS DENGAN METODE DAUR ULANG MENJADI PAVING BLOCK DAN BATAKO PLASTIK (PAPAH MODIS DALANG BATIK)	30
3. APLIKASI ELEKTRONIK KINERJA ORGANISASI (E-KINO) REFORMASI BIROKRASI	41
4. PEMBELAJARAN MENYENANGKAN BERBASIS PENGALAMAN LAPANGAN ANAK (PEMBELA) 50	
5. SISTEM DISPOSISI DIGITAL (SIDIGIT).....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penjelasan aspek Input, Proses dan Output	14
Tabel 2. Instrumen pengukuran dampak inovasi.....	15
Tabel 3. Rumus prosentase perubahan adalah sebagai berikut	20
Tabel 4. Perubahan Inovasi GETARI WISA.....	24
Tabel 5. Perubahan Inovasi PAPA MODIS DALANG BATIK	34
Tabel 6. Perubahan Inovasi EKINO	44
Tabel 7. Perubahan Inovasi PEMBELA	53
Tabel 8. Perubahan Inovasi SIDIGIT	62

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Pemerintah Kabupaten Balangan adalah **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut misi yang diusung adalah

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Strategi yang diambil adalah

1. Meningkatkan konektivitas wilayah dan antar wilayah
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan ruang
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi
4. Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur Perumahan Permukiman
6. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
7. Meningkatkan efektifitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan
8. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup
9. Optimalisasi pengelolaan kenakeragaman hayati
10. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
11. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
12. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
13. Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi
14. Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka
15. Meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
16. Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah
17. Meningkatkan Usia Harapan Hidup

18. Menurunkan Angka Kematian Ibu
19. Menurunkan Angka Kematian Bayi
20. Menurunkan Prevalensi Stunting
21. Menurunkan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun
22. Meningkatkan nilai SAKIP
23. Mempertahankan Opini BPK
24. Meningkatkan nilai EKPPD
25. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publ
26. Meningkatkan Indeks Kepuasan
27. Penurunan angka kemiskinan
28. Meningkatkan Angka PPKS yang tertangani
29. Mempertahankan Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA
30. Meningkatkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
31. Menurunkan Indeks Resiko Bencana
32. Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Balangan
33. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

Kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa program prioritas yakni sebagai berikut

1. Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Pembangunan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Peningkatan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Inovasi daerah sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria inovasi daerah harus memenuhi sebagai berikut :

- a. Mengandung pembaharuan sebagian atau seluruh unsur inovasi
- b. Memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan pembatasan pada masyarakat
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

- e. Dapat direplikasi
- f. Inovasi dibagi menjadi inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan bentuk inovasi daerah lainnya.

Tujuan inovasi daerah sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2017 adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapai tujuan tersebut sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Prestasi inovasi Kabupaten Balangan adalah pada tahun 2021 nilai indeks inovasi daerah adalah 42,62 (inovatif), tahun 2022 meningkat menjadi 57,57 (inovatif). Namun untuk peringkat meningkat cukup tinggi yakni dari peringkat 166 menjadi peringkat 45 dari 508 kabupaten/ kota di Indonesia. Peningkatan prestasi yang cukup signifikan ini diperoleh dari peningkatan metode penjangkaran inovasi daerah, pendampingan monitoring evaluasi pengisian data dukung kelengkapan inovasi sesuai indikator parameter Kemendagri, dan peningkatan kapabilitas dan keterampilan SDM inovasi (tim Klinik Inoba, Pamong Inovasi, Inovator dan Admin inovasi).

Monitoring dan evaluasi implementasi program menjadi salah satu indikator penilaian inovasi daerah, sebagaimana diketahui dalam juknis terbaru Kementerian Dalam Negeri bahwa indikator monitoring evaluasi mengukur kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah, dilihat dari a) hasil laporan monitoring evaluasi internal perangkat daerah, b) hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi survei kepuasan masyarakat, c) hasil laporan monitoring evaluasi eksternal berdasarkan hasil penelitian/ kajian/ analisis.

Keberhasilan program dapat diukur dengan cara a) menetapkan tujuan dan indikator sebagai alat ukur untuk masing-masing tujuan tersebut, b) Mengumpulkan data berupa angka statistik, survei, wawancara, atau informasi lain yang relevan dengan tujuan program, c) Analisis Data untuk mengevaluasi hasil program, d) Evaluasi Kualitatif untuk mendapatkan umpan balik dari peserta program, stakeholder, atau pihak terkait melalui metode wawancara, tinjauan literatur, atau diskusi kelompok, e) Bandingkan data dan temuan dengan target yang telah ditetapkan, apabila telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau memenuhi harapan yang diharapkan, jika ada ketidaksesuaian, identifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil tersebut, f) Perbaiki dan pelajari hasil evaluasi program untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program di masa depan.

Tujuan dilaksanakannya evaluasi implementasi program inovasi adalah a) mengukur keberhasilan implementasi program inovasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, b) mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dengan melibatkan pengumpulan dan analisis data pada aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, c) mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dialokasikan untuk inovasi, melibatkan pengukuran biaya, waktu dan sumber daya

untuk pelaksanaan inovasi, c) melingkarkan pembelajaran organisasi karena hasil analisis dan temuan inovasi mengidentifikasi rekomendasi untuk membantu mengubah budaya dan proses organisasi untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan, d) mendukung pengambilan keputusan karena evaluasi program inovasi menyediakan informasi penting yang dapat dipergunakan pengambil keputusan terkait pengembangan dan inventarisasi di bidang inovasi.

Mempertimbangkan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penelitian evaluasi implementasi inovasi daerah untuk mengukur keberhasilan, efisiensi dan efektivitas program inovasi guna memberikan masukan bagi pengembangan dan keberlanjutan implementasi program inovasi.

B. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah mengetahui efisiensi dan efektivitas implementasi program inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membantu kemudahan tata kelola pemerintahan Kabupaten Balangan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi sebagai salah satu dampak dari implementasi inovasi dilihat dari tahap input, proses, output dan dampak
2. Mengetahui kelemahan/ hambatan/ kendala yang dihadapi dalam implementasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
3. Aspek-aspek apa saja yang mengalami perubahan sebagai dampak dari implementasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya SKPD, BLUD dan UPT Puskesmas yang telah melaksanakan inovasi terkait dengan implementasi program inovasi yang selama ini telah dilaksanakan
2. Mengetahui dan memberikan informasi mengenai area perbaikan inovasi di sektor publik
3. Teridentifikasinya aspek-aspek yang mempengaruhi capaian dampak inovasi dan rekomendasi langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi program inovasi

D. Ruang Lingkup Penelitian

Lokus pelaksanaan penelitian evaluasi dampak Inovasi adalah di Kabupaten Balangan khususnya terkait pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta inovasi bentuk lainnya yang menjeri urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

- a. Inovasi pelayanan publik yakni inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/ jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/ jasa publik
- b. Inovasi tata kelola pemerintahan merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- c. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi yang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (berdasarkan PP nomor 38 tahun 2017 pasal 5 tentang inovasi daerah).

Inovasi yang menjadi obyek penelitian adalah inovasi yang telah dilaksanakan minimal 2 (dua) tahun rentang tahun 2021 sampai 2022.

Pengukuran dampak dilakukan pada level mikro, yaitu pengukuran dampak inovasi pada tataran output yang dihubungkan dengan ada tidaknya perubahan yang terjadi dari setiap pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi bentuk lainnya.

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah

- a. Identifikasi perubahan sebelum dan setelah implemenasi inovasi
- b. Identifikasi faktor kelemahan/ hambatan/ kendala implementasi inovasi
- c. Menyusun rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi inovasi

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Inovasi sektor publik

Secara umum, inovasi dapat dipahami sebagai proses perubahan perilaku. Inovasi bergerak dalam ruang yang dinamis dan senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut Everett M Rogers, inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Begitu halnya dengan pandangan Albury (dalam suwarno, 2008 : 10) yang secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Pengertian ini menekankan bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru (*invention*) yang bermanfaat. Mendefinisikan inovasi di sektor publik tidaklah sama dengan mendefinisikan inovasi di sektor privat. Inovasi tidak hanya menyangkut sesuatu yang baru, tetapi juga memberikan nilai tambah, baik dalam bentuk proses ataupun output dari suatu peoduk jasa/barang. Karena itulah, maka definisi sederhana dari inovasi sektor public adalah tentang bagaimana ide-ide baru itu bekerja untukmenciptakan nilai publik (OECD, 2014). Adapun karakteristik inovasi di sektor publik (OECD Observatory) adalah sebagai berikut:

1. **Kebaruan:** inovasi memperkenalkan pendekatan baru, sesuai dengan konteks atau lingkungan di mana inovasi akan diterapkan
2. **Implementasi:** inovasi harus dilaksanakan, bukan hanya sekedar ide
3. **Dampak:** inovasi bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih baik termasuk efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna atau karyawan.

Kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, dinyatakan bahwa “Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan tersebut diarahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah”. Selanjutnya dinyatakan bahwa inovasi daerah dapat berbentuk :

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, yang merupakan pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi Pelayanan Publik, yang merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; yang merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

B. Evaluasi Dampak

Dampak adalah hasil jangka panjang yang dihasilkan oleh suatu program, proyek atau kebijakan, termasuk hasil yang diharapkan dan tidak diinginkan terjadi, dampak positif dan negatif, serta dampak langsung dan tidak langsung (*Australian Gov; Department of industry, innovation, and science, 2015*). Identifikasi dampak ini bertujuan untuk melihat perbedaan utama dari suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan berdasarkan tujuan pelaksanaan. Hal ini pula, yang oleh *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* ikut mendefinisikan dampak sebagai cara untuk melihat pencapaian tujuan proyek atau program, atau lebih tepatnya terkait dengan kontribusi untuk pencapaian tujuan yang dilakukan yang keseluruhannya dapat ditempuh melalui satu instrumen pelaksanaan bernama *impact evaluation* atau evaluasi dampak.

Evaluasi dampak merupakan penyelidikan yang sistematis dan empiris terhadap dampak yang dihasilkan oleh suatu intervensi. Proses ini akan menentukan apakah suatu intervensi telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari program atau kegiatan atau tidak sama sekali. Selain itu, evaluasi dampak ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang berhasil atau tidak berhasil, bagaimana, untuk siapa, dan mengapa hal itu terjadi (*Impact Evaluation: A discussion paper for AusAID practitioners, 2012*). Evaluasi dampak dapat memberikan bukti secara nyata tentang dampak yang telah diproduksi (dampak yang diharapkan). Selain bukti yang kredibel tersebut, evaluasi dampak juga dapat mengarahkan pada inferensi kausal bahwa terjadinya perubahan sebagai bagian dari hasil pelaksanaan proyek, program atau kebijakan. Maka dari itu, Evaluasi dampak dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok sasaran, yang diakibatkan oleh program/proyek/kebijakan dan merupakan hasil dari kegiatan program/ proyek/ kebijakan.

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Tangkilisan (2003:28), menyebutkan ada empat jenis evaluasi dampak yaitu :

1. Evaluasi *single program after-only*. Jenis evaluasi ini merupakan yang paling lemah karena tidak diketahui baik tidaknya suatu program terhadap kelompok sasaran, dan tidak diketahui juga kelompok sasaran sebelum menerima program.
2. Evaluasi *single program before-after*. Jenis ini dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kelompok sasaran sebelum menerima program tetapi tidak dapat mengetahui efek dari program tersebut

3. Evaluasi *comparative after-only*. Merupakan evaluasi dengan cara membandingkan kelompok sasaran dengan kelompok bukan sasaran. Pada evaluasi jenis ini efek program terhadap kelompok sasaran tidak diketahui
4. Evaluasi *comparative before-after*. Merupakan gabungan dari ketiga kelompok diatas. Sehingga kelemahan yang ada diketiga desain diatas dapat diatasi oleh desain evaluasi ini.

Selain itu, ada pula jenis evaluasi dampak yang digunakan sebelum dan sesudah dan selama program dilaksanakan (*Australian Gov; Department of industry, innovation, and science, 2015*) yaitu :

1. *Ex post impact evaluation*, mengumpulkan data terkait actual impact
2. *Ex ante impact evaluation*, meramalkan kemungkinan dampak yang akan terjadi
3. *During implementation*, mengumpulkan data tentang kesesuaian dampak program yang dihasilkan dengan dampak yang diinginkan.

Patton dan Sawicky menguraikan 6 (enam) bentuk pendekatan evaluasi dasar yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi program, yaitu :

1. *Before and after comparisons*,

Pendekatan yang membandingkan kondisi (orang atau penduduk suatu daerah) sebelum dan sesudah program (*actual postprogram data*). Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi masyarakat sesudah program dijalankan (*actual postprogram data*) dengan masyarakat yang tidak menjalankan program atau kebijakan tersebut.

2. *With and without comparisons*.

Pendekatan untuk membandingkan antara grup target yang menerima program dan yang tidak. Adapun batasan-batasan antara pendekatan ini dan pendekatan pada nomor satu diatas adalah perlunya pemilihan kelompok yang akan dibandingkan dengan tepat, adanya asumsi bahwa perubahan-perubahan yang diamati di tempat kejadian perkara dapat dikenali.

3. *Actual-versus-planned performance comparisons*.

Pendekatan ini membandingkan data pasca pelaksanaan program secara aktual pada sasaran program yang timbul pada periode waktu sebelumnya (biasanya sebelum implemementasi program). Analis menentukan tujuan dan target yang spesifik untuk membuat kriteria evaluasi sebelum program dilaksanakan guna mengetahui periode waktu pelaksanaan program dan menentukan data yang dibutuhkan dari performa program yang dilaksanakan analis dalam hal ini membandingkan performa kebijakan secara actual terhadap kondisi masyarakat yang tidak menerima program.

4. *Experimental (controlled) models*

Pendekatan ini menggunakan konsep kontrol ekuivalen dan kelompok yang diuji cobakan serta ukuran-ukuran pra dan pasca pelaksanaan program. Unit analisis adalah individu dalam kelompok yang dipilih secara acak. Individu yang dimaksud adalah yang menerima atau melaksanakan program dan tidak atau melaksanakan program yang berbeda dengan kelompok yang dijadikan kelompok uji coba.

5. *Quasi-experimental models*

Pendekatan *Quasi-experimental models* mencoba mengukur hasil atau outcome dari program atau kebijakan melalui skor, angka atau indikator lainnya. Selain itu pendekatan ini juga mencoba untuk mempertahankan logika percobaan tanpa menggunakan suatu prosedur, teknik ataupun hal lainnya. Pendekatan ini memiliki 2 rancangan dasar yang dapat digunakan untuk melakukan analisis hasil pelaksanaan program terhadap target grup, yaitu rancangan non equivalent control group dan rancangan interrupted time-series design. Rancangan non equivalent control group melakukan perbandingan dari treatment group dan grup lainnya yang diujicobakan program, baik sebelum dan sesudah kebijakan atau program dilaksanakan. Adapun rancangan yang kedua melakukan perbandingan treatment grup dari waktu ke waktu baik sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Misalnya kondisi kelompok masyarakat sebelum pelaksanaan program diamati beberapa kali.

6. *Cost-oriented approaches*

Pendekatan Cost-oriented approaches merupakan jawaban atas kondisi yang mengharuskan mengukur dampak kebijakan dalam satuan uang, estimasi biaya dan keuntungan bersih dari perubahan yang terdeteksi dari pelaksanaan program, mengukur keuntungan yang terlihat maupun tidak serta biaya yang harus dikeluarkan baik secara langsung atau uang, maupun tidak langsung (dampak buruk yang akan dirasakan kedepannya).

Kajian The World Bank tahun 2006 tentang *Conducting Quality Impact Evaluations Under Budget, Time And Data Constraints* mengemukakan bahwa ada berbagai pilihan desain evaluasi dampak dimulai dari metode yang terkuat hingga lemah yaitu:

1. *Pre- and post intervention project and control group design with randomized or non-randomized assignment.*

Desain ini merupakan desain evaluasi paling kuat yang mengkombinasikan evaluasi pre and post intervention dengan menggunakan data awal/dasar dan melibatkan perbandingan antar kelompok.

2. *Delayed pre-test/post-test comparison group design.*

Desain ini bermanfaat ketika proses evaluasi dimulai dalam jangka menengah. Hal ini karena desain ini tidak menggunakan data awal/dasar (baseline), namun lebih pada penguatan evaluasi mid-term dan post intervention.

3. *Pre-and post-intervention project group and post-intervention comparison group.*

Meskipun desain ini lebih lemah dari sebelumnya, namun desain ini memungkinkan untuk melihat perbandingan dari waktu ke waktu dan analisis transversal pasca proyek. Dalam desain ini tidak menggunakan preintervention terkait perbandingan kelompok, tetapi hanya menggunakan post-intervention.

4. *Post-intervention project and comparison groups with no baseline data.*

Desain evaluasi ini hanya memfokuskan pada evaluasi dampak terhadap post-intervention data proyek dan perbandingan antar kelompok dan tanpa menggunakan baseline data.

5. *Pre- and post-implementation project group analysis with no comparison group*

Desain ini menghilangkan analisis terhadap evaluasi dampak dengan kelompok pembanding, namun tetap menggunakan pre and post intervention untuk proyek kelompok dan baseline data.

6. *Post-intervention project group without baseline data or a comparison group.*

Ini merupakan desain evaluasi yang paling lemah karena memfokuskan proses evaluasi post intervention tanpa pre-intervention dan berdasarkan baseline data.

C. Pengukuran Dampak inovasi sektor publik

Pengukuran dampak inovasi sektor publik cenderung lebih sulit daripada sektor privat (NESTA, 2011). Hal ini karena pengukuran di sektor publik tidak hanya dilakukan dari output keuangan semata, namun juga pada nilai publik yang dihasilkan. Menurut kajian NESTA, indeks inovasi sektor publik setidaknya mencakup empat bidang, yaitu :

1. *Improvement in organisational key performance indicators*
2. *Improvement in service evaluation*
3. *Improvement in efficiency*
4. *Improvement context*

Salah satu pengukuran dampak inovasi yang dilakukan di sektor publik misalnya dalam *Innovation in Public Sector Organisations, A Pilot Survey in measuring innovation across the public sector* yang dilakukan oleh *National Endowment for Science, technology, and the Arts (NESTA) of United Kingdom* pada tahun 2011. Survey ini menjadi stimulus untuk membuat indeks pengukuran inovasi organisasi

sektor publik yang sangat berguna bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan institusi lainnya yang berhubungan dengan sektor publik. Jenis pengukuran inovasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah inovasi berupa jasa (dalam penelitian ini jasa dalam bidang kesehatan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner, indikator yang digunakan dalam kuesioner ini adalah mengadopsi *Private Sector Index Survey*. Adapun indikator-indikator tersebut berupa :

1. *Efficiency*, terkait dengan efisiensi biaya yang terjadi setelah adanya inovasi
2. *Quality*, terkait dengan kualitas dari layanan inovasi.
3. *Access to service*, terkait dengan akses pelayanan yang semakin mudah atau malah justru semakin sulit.
4. *Costumer Feedback*, terkait dengan apakah terdapat ruang bagi konsumen untuk memberikan feedback dalam rangka peningkatan inovasi.
5. *Speed Of Delivery*, terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan untuk satu layanan tertentu.
6. *Range Of Services*, terkait dengan seberapa jauh jangkauan pelayanan yang diberikan setelah inovasi.

Pengukuran dampak inovasi sektor publik lainnya juga dilakukan SEAT (*Socio Economic Assesmet Toolbox*) yang merupakan sebuah perangkat penelitian yang digagas oleh *Government and Social Affairs*, Pemerintah Inggris pada tahun 2012 untuk menilai seberapa besar dampak dari sebuah inovasi kebijakan pemerintahan terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang diafirmasikan ke dalam kebijakan ini. Penelitian tersebut menilai dengan cara yang holistik dengan asumsi bahwa kelima indikator bisa sesuai dengan tahapan implementasi inovasi. Pada studi kasusnya, kebijakan pemerintah Inggris yaitu dengan mendorong terbentuknya kelompok pekerja yang berlatar belakang Anglo American, untuk bisa diakselerasi tingkat perekonomian di daerah dekat pertambangan, sekaligus mengubah sosial-kultural masyarakat yang pasif akan kondisi ekonomi. Metode yang digunakan untuk menilai keberhasilan adalah dengan metode kualitatif, dengan melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan kelompok pekerja tersebut. Tujuan FGD tersebut yaitu untuk menilai seberapa jauh indikator tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun indikator tersebut sebagai berikut :

1. *Inform*, Memberikan informasi yang seimbang dan objektif terkait adanya inovasi kepada stakeholders dengan tujuan awareness
2. *Consult*, Memberikan informasi yang seimbang dan objektif terkait adanya inovasi kepada stakeholders dengan tujuan pemahaman.

3. *Involve*, Melibatkan secara langsung stakeholders dengan tujuan mendapatkan feedback dan alternative inovasi.
4. *Collaborate*, Merumuskan sebuah inovasi bersama stakeholders dengan menjamin berjalannya aspirasi, ide, dan gagasan.
5. *Empower*, Memberdayakan secara mandiri stakeholders untuk dapat menjalankan inovasi dengan tujuan sustainability.

Di berbagai negara, pengukuran dampak inovasi tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah. TEKES (*The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation*) yang merupakan sebuah badan atau organisasi di Finlandia turut serta berkontribusi dalam melakukan berbagai pengukuran dampak inovasi yang bidangnya fokus pada *financing research, development and innovation*. TEKES saat ini telah mendukung berbagai kegiatan inovasi yang luas di bidang riset, industri dan sektor jasa. Tujuannya agar program bidang penelitian, pengembangan dan inovasi dapat menciptakan keuntungan jangka panjang bagi ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu indikator pengukuran dampak inovasi yang dihasilkan bernama Tekes Model. Tekes model ini pernah digunakan oleh beberapa organisasi yang juga bergerak disektor pengembangan inovasi khususnya pada sektor privat yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat, seperti *GAP (Global Access Program)* di *University of California* dan VINNOVA yang merupakan organisasi di Swedia yang berfokus pada pengukuran dampak pertumbuhan berkelanjutan di Swedia.

TEKES mengembangkan sebuah *General logic model for innovation* yang didalamnya mengukur dampak inovasi. Model ini membagi dampak inovasi kedalam tiga garis besar yaitu *immediate Impacts, Intermediate Impacts* dan *Ultimate Impacts*.

1. *Immediate Impacts*

Immediate impacts menekankan pada konteks *increased resources or capabilities*. Dari konteks ini dapat dijabarkan sejumlah indikator berdasarkan pada ide/gagasan inovasi yang dikembangkan. Berikut indikatornya:

- *Information and advice*
Dampak ini berfokus bagaimana kemampuan inovasi dapat memberikan informasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan suatu *feedback* terhadap penyelenggara inovasi yang dinamakan sebagai *advice* (saran).
- *Competence*
Indikator ini berfokus pada sejauh mana inovasi telah menghasilkan peningkatan kemampuan dan keahlian pada individu atau masyarakat.
- *On raising capital / Strengthened Resource*

Terkait dengan peningkatan modal dan penguatan sumber daya yang dimiliki suatu daerah

- *Business linkages with service providers*

Jika dalam sector privat menekankan pada bagaimana hubungan bisnis dengan penyedia layanan, maka untuk sektor publik dapat menekankan pada hubungan penyedia layanan dan masyarakat terkait dengan program inovasi.

- *On selling in new markets*

Inovasi dapat berdampak pada terbukanya jaringan pasar/markets baru bagi masyarakat sebagai akibat dari program inovasi

2. *Intermediate Impacts*

Kunci utama dari *Intermediate impacts* menekankan pada *improved performance*. Indikator ini bertumpu pada konteks peningkatan kinerja sebagai bagian dampak inovasi. Adapun indicator yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- *Increased revenues*

Terkait dengan terjadinya peningkatan pendapatan rata-rata baik individu atau masyarakat

- *Increased employment*

Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan bekerja bagi masyarakat yang lebih luas.

- *New products and service*

Dampak inovasi terkait dengan adanya produk baru yang dihasilkan yang memiliki nilai lebih dari sebelumnya. Begitu halnya dengan kualitas pelayanan yang lebih mudah, murah, nyaman, tidak berbelit-belit, dapat diakses, dan sebagainya.

- *Productivity*

Dampak inovasi terkait dengan terjadinya peningkatan produktivitas kinerja dalam masyarakat

- *Reduced environmental impact*

Kemampuan inovasi terkait juga pada sejauh mana inovasi dapat mengurangi dampak lingkungan yang dapat mungkin menyebabkan produktivitas masyarakat berkurang.

- *Increased investment and collaboration*

Inovasi dapat menyebabkan peningkatan investasi atau penanaman modal dan juga pihak lain untuk turut terlibat berkolaborasi terhadap program inovasi

- *Renewal of Business/organizational structures*

Terkait dengan proses perubahan dan pembaharuan struktur organisasi, kewenangan, tugas dan fungsi yang sesuai dengan konteks program inovasi

3. *Ultimate Impacts*

Ultimate Impacts menekankan pada konteks *socio-economic benefit* yang dihasilkan oleh program inovasi. Adapun sejumlah indikator yang dapat dijabarkan berupa :

- *Sustainable wealth and job*
Terjadi peningkatan kekayaan dan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan
- *Environmental and health care improvement*
Terciptanya lingkungan yang nyaman dan perbaikan serta peningkatan tingkat kesehatan masyarakat
- *Regional Viability/vitality*
Inovasi berdampak pada meningkatnya angka harapan/kesempatan hidup di suatu wilayah atau daerah
- *Safety and security*
Dampak inovasi terkait dengan rasa aman dan jaminan keamanan bagi masyarakat
- *Social well-being*
Inovasi memberikan dampak pada kemandirian dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

D. Kerangka Pikir

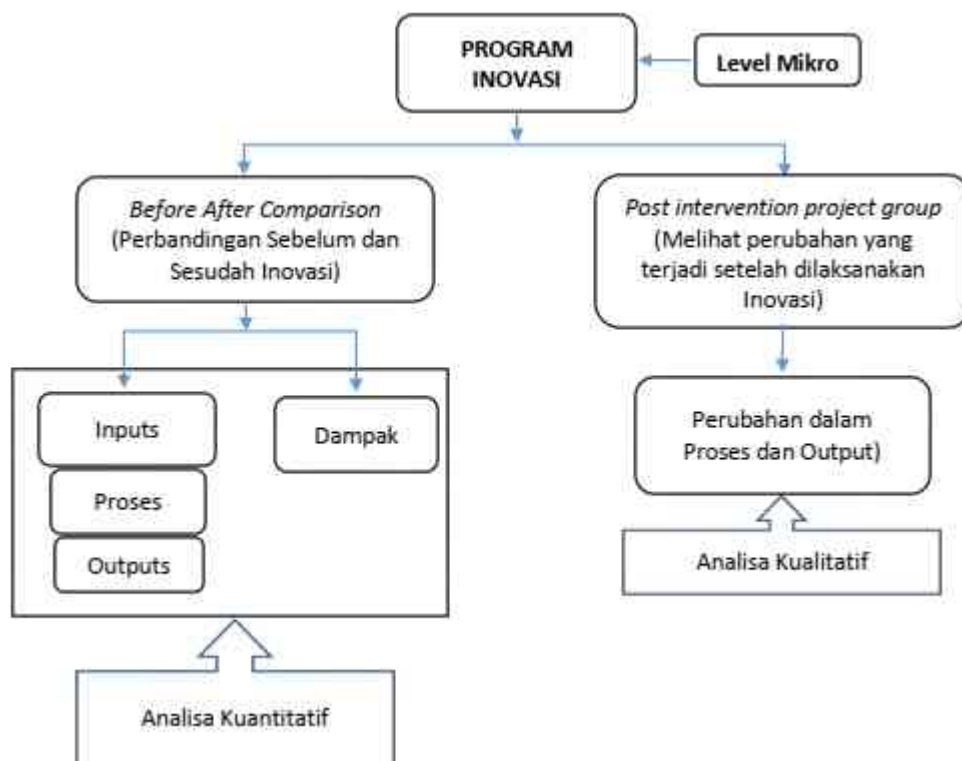
Pengukuran dampak inovasi dilakukan untuk mengetahui dampak dari suatu program inovasi yang telah berjalan. Dalam pelaksanaan ini, pendekatan evaluasi yang digunakan menggunakan pendekatan *before after comparison* (Patton and Sawicky) yang dikombinasikan dengan pendekatan *Post intervention project group without baseline data or a comparison group* (World Bank). Pada pendekatan *before after comparison*, program inovasi akan diukur dengan membandingkan kondisi sebelum inovasi dan sesudah inovasi dilaksanakan. Pendekatan *Post-intervention project group without baseline data or a comparison group*, pendekatan evaluasi yang langsung memfokuskan pada ada/tidaknya perubahan yang ditimbulkan dari suatu proses tanpa melibatkan penggunaan baseline data ataupun perbandingan antar grup dalam proses pengukuran dampak inovasi. Pendekatan *before after comparison*, dioperasionalkan dengan menggunakan perbandingan kelompok indikator seperti: **input dengan input, proses dengan proses, dan output dengan output**. Indikator dalam masingmasing kelompok, adalah:

Tabel 1. Penjelasan aspek Input, Proses dan Output

INPUT	PROSES	OUTPUT
1. Biaya/anggaran/dana; 2. Sumber Daya Manusia; 3. Kelengkapan yang menjadi pendukung proses.	1. Mekanisme/ prosedur yang dilakukan; 2. Waktu layanan	1. Produktivitas; 2. Kualitas hasil

Pendekatan Post-intervention project group without baseline data or a comparison group diukur berdasarkan pada **dampak/perubahan yang terjadi** (yang langsung bisa dilihat dari data atau wawancara/testimoni). Pendekatan ini digunakan terhadap kondisi perubahan yang dirasakan oleh pelaku ataupun pihak lain, namun tidak memiliki data sebelumnya yang bisa dijadikan pembanding secara kuantitatif. Oleh karena itu, hasil pengukuran dari pendekatan ini lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada deskripsi hasil wawancara atau testimoni. Alur pikir untuk melakukan pengukuran dampak inovasi ini, digambarkan dalam skema alur sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Pengukuran Dampak Inovasi



E. Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka untuk mengoperasionalkan indikator-indikator pengukuran dampak inovasi ini, diuraikan lebih lanjut dalam bentuk operasionalisasi konsep pengukuran yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan instrumen pengukuran dampak inovasi. operasionalisasi variabel dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Instrumen pengukuran dampak inovasi

Variabel	Indikator	Dimensi Konseptual	
Input	Biaya/ Anggaran	Biaya Langsung	Biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan (biaya administrasi/ tarif layanan)
			Biaya modal yang dikeluarkan untuk usaha atau menghasilkan produk
		Biaya tidak langsung	Biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan untuk memperoleh produk layanan seperti: biaya transport, akomodasi, dll.
	SDM Pelaksana	Jumlah	Jumlah SDM yg terlibat dalam penyelenggaraan layanan (jumlah pegawai yang terlibat dalam alur 1 jenis layanan)
	Kelengkapan kerja	Peralatan/ fasilitas pendukung kinerja pelayanan	Peralatan & perlengkapan yg mendukung penyelenggaraan pelayanan (komputer, mobil, atk, meja, ketersediaan ruangan ataubangunan khusus, dll)
Proses	Mekanisme	Prosedur penerapan layanan	Persyaratan mendapatkan layanan dan unit layanan yg dilalui.
		Metode mendapatkan layanan	Cara yg dilakukan untuk mendapatkan pelayanan (online/offline, pendelegasian wewenang, jemput-bola, pesan antar, dll)
	Waktu layanan	Waktu pelayanan	Seberapa lama waktu yg digunakan untuk menghasilkan pelayanan.
Output	Produktivitas	Jumlah layanan yang dihasilkan	Jumlah layanan yg dihasilkan dalam Periode waktu tertentu (perjam/hari/bulan) atau, Jumlah penerima layanan publik yang dapat dilihat dari; jumlah pemohon, jumlah pengunjung, dsb.
		Jumlah produksi usaha	Omzet produksi usaha masyarakat.
	Kualitas	Kualitas mutu layanan	Mutu produk layanan. Bisa dilihat dari kualitas produk hasil layanan; Survey Kepuasan Masyarakat; atau analisa atas tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya, dan prosedur layanan
		Kualitas produk usaha masyarakat	Perubahan mutu produk usaha masyarakat (misal; kualitas rasa, pengemasan, metode pengiriman, dsb)
Dampak	Pendapatan pemerintah	Jumlah pendapatan pemerintah daerah	Jumlah pendapatan pemerintah daerah yg diperoleh dari inovasi (pendapatan daerah; pajak, retribusi masyarakat)
	Tingkat kesejahteraan masyarakat	Jumlah pendapatan masyarakat	Jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat setelah mendapatkan program inovasi (penghasilan, laba usaha)
		Perubahan kondisi kemiskinan	Perubahan indikator statistik kemiskinan di daerah tersebut.
	Penyerapan tenaga kerja	Penyerapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yg terserap setelah dilaksanakan inovasi
	Tingkat kesadaran/ perubahan pola pikir	Perubahan pola pikir/ kesadaran/ kedisiplinan pegawai pemerintah	Perubahan pola berfikir atau peningkatan kesadaran atau kedisiplinan pegawai pemerintah atas suatu isu/ permasalahan di organisasi
		Perubahan pola pikir/ kesadaran/ kedisiplinan masyarakat	Perubahan pola berfikir atau peningkatan kesadaran atau kedisiplinan masyarakat atas suatu isu/ permasalahan di daerah.

Variabel	Indikator	Dimensi Konseptual	
	Peningkatan pengetahuan atau keterampilan	Peningkatan pengetahuan atau keterampilan masyarakat	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

Sumber : Pengukuran Dampak Inovasi, LAN, 2018

III. METODE

A. Pendekatan Penelitian

Kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi merupakan aktivitas evaluasi dampak program inovasi yang telah diimplementasikan oleh SKPD/ Unit Kerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan berbasis kuantitatif dan kualitatif (eksplorasi) dengan memilih metode *before after comparison* (kuantitatif) dan *Post Test Without Comparison Group and Baseline Data* (kualitatif). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori atau instrument yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Penelitian ini bersifat objektif karena aspek terpenting dalam paradigma penelitian post-positivistis adalah sikap objektif dimana peneliti harus menguji kembali metode-metode dan kesimpulan-kesimpulan yang sekiranya mengandung bias (Creswell, 2010: 10)

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan pengukuran dampak inovasi, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan antara lain :

- a. **Studi Literatur**, merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal maupun bahan bacaan tertulis lainnya yang terkait dengan penentuan instrumen untuk pengukuran dampak inovasi. Dalam hal ini, studi literatur yang dilakukan adalah mengumpulkan teori-teori mengenai dimensi atau aspek pengukuran dampak inovasi terdahulu.
- b. **Focus Group Discussion (FGD)**, Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data primer dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Permasalahan yang dibahas dalam FGD sangat spesifik karena untuk memenuhi tujuan yang sudah jelas. Oleh karena itu, pertanyaan yang disusun dan diajukan kepada para peserta FGD jelas dan spesifik. Dalam kegiatan ini FGD dilakukan dengan memberikan arahan mengenai pengisian instrumen pengukuran dampak inovasi dimulai dari Judul, deskripsi, kegiatan, tujuan dan manfaat, serta deskripsi before-after inovasi berdasarkan masing-masing instrumen.
- c. **Wawancara mendalam**, Wawancara-Mendalam (In-depth Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau

tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Dalam kegiatan pengukuran dampak inovasi, setelah dilakukan FGD, peneliti menentukan inovasi yang dipilih untuk dilakukan wawancara dan observasi lapangan serta memilih instrumen yang paling berdampak terhadap stakeholders serta menyusun pedoman wawancara.

- d. **Observasi lapangan**, Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-participant. Artinya, penulis melaksanakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian akan tetapi tidak ikut serta dalam proses kerja. Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena dari objek yang diukur. Pengamatan dilakukan dalam rangka merekam keadaan, kegiatan, dan kejadian-kejadian di lapangan yang berkaitan dengan instrumen pengukuran dampak inovasi.

C. Instrumen pengukuran

Instrumen yang digunakan untuk menggali data adalah:

- a. **Angket**, Angket merupakan tehnik sekaligus instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selain itu, angket juga digunakan sebagai panduan untuk melakukan wawancara dan observasi.
- b. **Data Sekunder**, Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

D. Kriteria Penentuan Sampling

Sampling untuk pengukuran dampak inovasi ini, dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: Sampling untuk lokus dan sampling untuk jenis inovasi yang akan diukur. Penentuan sampling tersebut, didasarkan pada sejumlah kriteria seperti:

- a. Merupakan inovasi yang digagas oleh pemerintah daerah yang sampai saat ini masih berjalan dan telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun.
- b. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah mereka yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan Laboratorium Inovasi tahun 2015-2016.
- c. Inovasi yang memiliki klasifikasi :
 - Pelayanan Publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

- Tata Kelola Pemerintahan merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- Inovasi Daerah Lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Inovasi Daerah). Dalam kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi, Inovasi Daerah Lainnya yaitu Inovasi Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian dalam mengumpulkan sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu informan yang dipilih dengan sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang diinginkan peneliti dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Adapun kriteria informan dalam pengukuran dampak inovasi ini, adalah :

- a. Pelaksana inovasi, merupakan orang yang melaksanakan pekerjaan baik sebelum maupun sesudah adanya inovasi, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat atau LSM.
- b. Penggagas inovasi, orang atau pihak yang pertamakali memunculkan ide/gagasan inovasinya sehingga dipanang sebagai salah satu yang paling memahami program inovasi tersebut.
- c. Jajaran pimpinan OPD yang terlibat secara langsung dalam proses inovasi di lingkungannya.
- d. Penerima atau sasaran inovasi, yaitu pihak yang terlibat sebagai pengguna atau yang terdampak dari proses inovasi. Pihak ini bisa dari unsur masyarakat ataupun unsur pemerintahan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses dan interpretasi data dari hasil pengolahan data agar memiliki makna dan informatif. Dalam penelitian ini, semua data dan mendalam, observasi, serta studi literatur, diolah dan dianalisis untuk kemudian disajikan secara deskriptif.

Pengolahan data Sebelum tim pengukuran melakukan proses pengumpulan data di lapangan, terlebih dahulu ditentukan lokus dan jenis inovasi yang akan dijadikan sampel. Berdasarkan hasil pengumpulan sampel yang terkait dengan jenis inovasi, Tim melakukan pengklasifikasian terhadap jenis inovasi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Tata Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya, Proses pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui FGD dan wawancara mendalam (depth interview). Hasil wawancara diseleksi dan diambil data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu pengukuran dampak inovasi, yang kemudian diikuti dengan pengklasifikasian data ke dalam tiga jenis inovasi yakni jenis inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi pemberdayaan masyarakat.

b. Display Data

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data untuk proses penyajian data dalam bentuk tulisan, tabel, serta kutipan hasil wawancara setelah pereduksian data selesai. Kemudian dirangkum secara sistematis agar mudah difahami.

c. Verifikasi Data

Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan terhadap kesimpulan yang telah diambil tentunya dengan data pembanding dari hasil pengumpulan data. Proses verifikasi dapat dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu proses check dan recheck antara satu sumber dengan sumber lainnya. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kemabali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

Teknik Analisa Data

a. *Before After Comparison*

Pendekatan untuk mengukur dampak dengan cara membandingkan kondisi (orang atau penduduk suatu daerah) sebelum (before) dan sesudah (after) program inovasi (actual postprogram data). Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi masyarakat sesudah program inovasi dijalankan (actual postprogram data). Adapun cara untuk melihat dampak inovasi dilakukan dengan menghitung perbandingan dari indikator input, proses, dan output berdasarkan data-data sebelum dan sesudah inovasi dilaksanakan. Rumus persentase perubahan :

Tabel 3. Rumus prosentase perubahan adalah sebagai berikut

$\left(\frac{x - y}{y}\right) \times 100\%$	Untuk Perhitungan apabila kondisi pasca inovasi lebih kecil dibandingkan sebelum inovasi, namun menunjukkan derajat nilai perubahan Positif (efektif – efisien). Misalnya: Waktu, Jumlah SDM, Biaya.
$\left(\frac{y - x}{x}\right) \times 100\%$	Untuk Perhitungan apabila nilai pasca inovasi lebih besar dibandingkan sebelum inovasi, dan menunjukkan derajat nilai perubahan Positif. Misalnya: untuk nilai Output, produksi, dsb. Atau dengan rumus:

$\left(\frac{y}{x}\right) \times 100\%$	Untuk penghitungan nilai kinerja atau produktivitasnya.
$\bar{X} \frac{I + P + O}{3} \times 100\%$	Perhitungan Dampak Program Inovasi dihitung dari rata-rata nilai dampak Input, Proses, dan Output. Penghitungan ini dilakukan apabila data dampak yang ditimbulkan tidak diperoleh di dalam data lapangan.

Keterangan :

X = Keadaan sebelum inovasi

Y = Keadaan setelah Inovasi

I = Input

P = Proses

O = Output

\bar{X} = Rata - rata

b. Post Intervention Project Group

Post Intervention Project Group Post-Intervention merupakan desain evaluasi untuk mengukur dampak dengan cara menggali data setelah program dilaksanakan tanpa harus membandingkan data sebelum program dilaksanakan. Pengukuran dampak dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai data kualitatif seperti wawancara dengan *key informan*, FGD, data-data program, dan data statistik dari instansi inovator.

IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. GERAKAN CINTA TARI WARISAN SANGGAM (GETARI WISA)

1.1 Deskripsi Inovasi

Pentingnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan Pembinaan Seni Tradisional secara tegas telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan diantaranya untuk memperkaya keberagaman budaya, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melestarikan warisan budaya bangsa sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Salah satu bentuk seni tradisional adalah Seni Tari.

Keberagaman sosial, budaya, bahasa, adat istiadat, tradisi, geografis, sejarah, kepercayaan, mata pencaharian dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan melahirkan beragam ciri khas kehidupan masing-masing wilayah yang sering mereka ekspresikan dalam bentuk tarian adat yang diwariskan secara turun temurun sampai sekarang dalam berbagai peristiwa adat maupun disajikan pada event-event daerah dan nasional.

Dalam upaya terus menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemajuan kebudayaan khususnya seni tari tradisional di Kabupaten Balangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk program disebut GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam).

Permasalahan (Hulu) :

1. Kurangnya ruang / wadah /sarana dan prasarana sebagai media ekspresi bagi pegiat / pelaku seni tari tradisional;
2. Kurangnya waktu dan jumlah event yang diikuti oleh pegiat dan pelaku seni tari tradisional;
3. Kurangnya Pembinaan bagi pelaku/pegiat seni tari tradisional ;
4. Kurangnya Pengembangan Seni Tari Tradisional;
5. Kurangnya durasi waktu latihan tari tradisional;
6. Kurangnya SDM dan kompetensi SDM pelaku/pegiat seni tari tradisional ;
7. Kurangnya Pelatih/Instruktur berkualifikasi seni tari tradisional.
8. Kurangnya agenda-agenda yang melibatkan seni tari tradisional.
9. Kurangnya penghargaan terhadap pegiat/pelaku seni tari tradisional

Metode & Strategi Pemecahan Masalah :

1. Meningkatkan akses dan ruang / wadah sebagai media ekspresi seni tari tradisional;
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana seni tari tradisional;
3. Meningkatkan durasi event dan jumlah event kegiatan seni tari tradisional;

4. Meningkatkan jumlah keterlibatan seni seni tari tradisional di ajang agenda daerah maupun luar daerah.
5. Meningkatkan jumlah pelatih Seni Tari tradisional ;
6. Meningkatkan durasi waktu Latihan;
7. Meningkatkan jumlah SDM pelaku/pegiat seni tari tradisioal;
8. Meningkatkan pengembangan seni tari tradisional dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
9. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pelaku/ penggiat seni tari tradisional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

Manfaat atau Dampak Hilir :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan meningkatkan keamanan dan perlindungan data serta mempercepat penyajian data kesenian.
2. Masyarakat penggiat/pelaku seni tari lebih mudah dan lancar mengexpresikan karya seni tari yang mereka miliki dan mengembangkan seni tari.
3. Meningkatnya kecerdasan masyarakat dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan keterampilan terkait seni tari.
4. Meningkatnya keragaman seni tari.
5. Meningkatnya nilai/ citra positif/ promosi daerah.
6. Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat.
7. Meningkatnya motivasi dan partisipasi masyarakat mensukseskan program pemerintah dalam pemajuan kebudayaan.
8. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Cara kerja atau operasional inovasi GETARI WISA adalah

1. Tim pengelola program yang terdiri dari pejabat-pejabat dan sebagian staf lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menyusun dan membuat perencanaan dan anggaran secara terukur dan berkelanjutan setiap tahun sesuai dengan tugas, kewenangan dan fungsinya masing-masing berdasar dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tim pengelola program melaksanakan anggaran, melakukan pembinaan, peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia, fasilitasi, asistensi, koordinasi, konsultasi, komunikasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Program sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing berdasar peraturan perundang- undangan yang berlaku.

3. Tim pengelola membuat laporan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.2 Data Perubahan

Tingkat kesenian daerah pada umumnya diukur dari berbagai faktor dan indikator diantaranya adalah

- a. warisan budaya meliputi keberadaan dan pemeliharaan bangunan bersejarah, situs arkeologi, seni rupa tradisional, musik tradisional, tarian, pakaian adat, dan tradisi lisan.
- b. intensitas pertunjukan dan festival budaya yang melibatkan kegiatan pertunjukan seni seperti teater, musik, tari, festival budaya, perayaan adat yang diagendakan secara rutin.
- c. karya seni kontemporer yang dihasilkan oleh seniman lokal, termasuk lukisan, patung, instalasi seni, seni media, seni digital, dan karya seni lainnya.
- d. Kegiatan seni masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni seperti seni rupa komunitas, seni pertunjukan lokal, keterlibatan dalam kelompok kesenian, dan kegiatan kreatif masyarakat.
- e. Ketersediaan dan kualitas pendidikan seni di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan di daerah tersebut.
- f. Penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi yang diperoleh oleh seniman, kelompok kesenian, atau komunitas seni daerah tersebut di tingkat regional, nasional, atau internasional.
- g. Ketersediaan infrastruktur budaya (ketersediaan dan kualitas) sarana dan prasarana budaya seperti museum, galeri seni, teater, auditorium, pusat seni, perpustakaan, dan ruang pameran.
- h. Partisipasi/ keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya, termasuk dukungan mereka terhadap seniman dan kelompok seni lokal.
- i. Kontribusi ekonomi kreatif dalam pengembangan seni dan budaya di daerah tersebut, termasuk industri kreatif, pariwisata budaya, kerajinan tangan, dan industri seni lainnya.

Berikut ini merupakan ringkasan perubahan sebelum dan sesudah ada inovasi GERTARI WISA

Tabel 4. Data Perubahan pada inovasi GETARI WISA

Indikator	Deskripsi Perubahan
Infrastruktur seni/ sarana prasarana penunjang kesenian yang tersedia di Kabupaten Balangan	Sebelum ada inovasi GETARI WISA kegiatan seni tari di Kabupaten Balangan belum terlalu berkembang, namun saat ini sudah ada 1 (satu) Gedung Budaya skala kabupaten, terdapat sanggar seni yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan (10 sanggar tari), wadah/ tempat berkespresi seni tari sebanyak 10 tempat.
Kegiatan meningkatkan kemampuan seni tari	GETARI WISA memfasilitasi peningkatan kemampuan seni dan membudayakan seni tari di masyarakat. Sehingga sepanjang tahun 2021-2022 telah dilaksanakan pelatihan/ bimtek seni tari

Indikator	Deskripsi Perubahan
	sebanyak 50 pelatihan/ bimtek.
Jumlah karya seni yang ditetapkan	Berkat pembinaan dan fasilitasi dari GETARI WISA ini Kabupaten Balangan berhasil menetapkan 7 jenis tari tradisional
Intensitas pertunjukan dan festival budaya	Setelah diimplementasikannya GETARI WISA jumlah gelaran/ event tari di Kabupaten Balangan selama tahun 2020-2022 yang berhasil terlaksana adalah sebanyak 33 gelaran/ event. Belum termasuk kegiatan festival budaya, perayaan adat yang diagendakan secara rutin misalnya di Kecamatan Halong (Mesiwah Pare Gumboh, aruh/ pesta adat Dayak) dan di Kecamatan Paringin (Rancah Mampulang), serta agenda wisata budaya lainnya.
Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam bidang seni tari	Sebelumnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam bidang seni tari dapat dikatakan masih kurang, namun saat ini sudah terdapat pelaku/penggiat seni tari sebanyak 230 orang. Dimana dalam meningkatkan kemampuan tarinya didampingi oleh 20 orang pelatih tari
Prestasi dan penghargaan di bidang seni tingkat kabupaten maupun provinsi	Melalui pembinaan, pendampingan kesenian tari dari tim GETARI WISA saat ini Kabupaten Balangan sudah memiliki 4 sanggar seni tari yang berpartisipasi dalam event Kabupaten, dan 2 sanggar seni yang berprestasi dalam event Nasional. Untuk event kabupaten, prestasi yang berhasil ditorehkan adalah memenangkan lomba pada kegiatan seni/Pelaku seni sebanyak 5 penghargaan, sedangkan di tingkat provinsi adalah perolehan penghargaan seni/Pelaku seni Tingkat Provinsi sebanyak 5 penghargaan.
Tumbuhnya ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan	Tahun 2018 sebuah penelitian mengidentifikasi bahwa ekonomi kreatif belum memperoleh perhatian yang cukup untuk pengembangannya, karena belum adanya Peraturan Daerah terkait EKRAF. Arah pengembangan ekonomi kreatif Balangan adalah kuliner (mandai krispi, dodol cempedak, rimp, usaha pembuatan gula aren/gula merah, usaha pembuatan gula semut, kerupuk dan bolu waluh, keripik pisang talas, amplang patin, keripik makanan, pembuatan madu gunung, sirup Batumandi), kriya (anyaman bamban) dan fashion (sasirangan). Seni tari sebagai salah satu bentuk kreatifitas sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk dilestarikan, dikembangkan dan ditingkatkan lagi sebagai bagian dari ekonomi kreatif.

Sumber: Hasil Analisis, tahun 2022

1.3 Analisis Dampak

Inovasi memfasilitasi gerakan cinta tari di daerah melalui pelestarian, dan pengembangan dapat memberikan berbagai manfaat yang positif, baik secara individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat/ dampak positif dari inovasi GETARI WISA yakni pemertahanan warisan budaya; sebagai identitas dan rasa kebanggaan terhadap seni tari tradisional khas Kabupaten Balangan; sebagai ajang kreativitas dan ekspresi diri; membangun kesehatan fisik dan kesejahteraan mental; membangun komunitas pecinta tari tradisional; menunjang dan meningkatkan pelestarian pariwisata budaya; selain itu juga berpotensi untuk

memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan iklim yang kaya secara budaya di Kabupaten Balangan.

Mengukur keberhasilan sebuah inovasi yang berhubungan dengan memfasilitasi pelestarian dan pengembangan gerakan cinta tari warisan daerah dapat diukur diantaranya melalui :

1. Partisipasi dan keterlibatan, yakni jumlah orang yang terlibat dalam gerakan cinta tari, baik sebagai penari, pelatih, atau pendukung. Dapat pula dilakukan survei atau wawancara untuk mengevaluasi tingkat kepuasan dan keterlibatan peserta.
2. Pemertahanan dan peningkatan warisan budaya, mengidentifikasi keberhasilan inovasi tersebut dalam mempertahankan dan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan praktik tari tradisional di masyarakat. Misalnya, peningkatan jumlah pertunjukan tari tradisional, apakah generasi muda terlibat aktif, atau peningkatan apresiasi terhadap warisan budaya daerah.
3. Dampak sosial dan ekonomi, meliputi peningkatan pariwisata budaya, peningkatan pendapatan bagi pelaku seni, peningkatan kesadaran sosial, atau peningkatan kerjasama antara komunitas dan pemangku kepentingan terkait.
4. Peningkatan kualitas dan kreativitas, yang dinilai dari pengamatan terhadap peningkatan kualitas pertunjukan, pengembangan inovasi baru dalam gerakan atau koreografi, dan pengakuan atau penghargaan yang diterima dalam bidang tari.
5. Efek transformasional, dimana gerakan cinta tari yang terdorong tersebut menyebabkan perubahan positif dalam masyarakat dan memberikan dampak yang lebih luas. Misalnya, apakah gerakan ini mendorong inklusi sosial, meningkatkan kesadaran budaya, atau membangun ikatan sosial yang lebih kuat di masyarakat.
6. Evaluasi partisipatif, yakni melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi. Karena dengan melibatkan mereka dalam penilaian keberhasilan gerakan, dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang efek nyata dan pentingnya gerakan cinta tari dalam mempengaruhi kehidupan mereka.
7. Survei dan pendapat publik, yang diukur dengan survei dan wawancara kepada masyarakat terkait persepsi mereka tentang pendampingan/ fasilitasi gerakan cinta tari tradisional, manfaat yang mereka rasakan, serta harapan dan saran untuk perbaikan lebih lanjut.

Inovasi GETARI WISA dalam implementasinya mungkin menghadapi beberapa permasalahan yang mungkin timbul. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan yang bisa terjadi:

1. Kurangnya pembiayaan, salah satu permasalahan yang sering muncul adalah keterbatasan dana untuk mendukung pelaksanaan gerakan cinta tari warisan daerah. Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pertunjukan, pelatihan, pengadaan kostum, dan peralatan seringkali menjadi hambatan.

2. Rendahnya kesadaran dan minat masyarakat, mungkin ada kurangnya kesadaran atau minat masyarakat terhadap tari tradisional dan warisan budaya daerah. Hal ini dapat membuat sulit untuk mendapatkan partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat.
3. Kehilangan pengajar dan ahli, keterbatasan jumlah pengajar, ahli, atau tokoh budaya yang kompeten dalam tari tradisional dapat menghambat implementasi inovasi GETARI WISA. Kurangnya pendidikan formal atau kesempatan pelatihan yang memadai untuk generasi muda juga dapat menjadi permasalahan.
4. Perubahan nilai dan gaya hidup, perkembangan tren modern dan perubahan gaya hidup dapat mengurangi minat terhadap tari tradisional. Generasi muda mungkin lebih tertarik pada hal-hal baru dan internasional, sementara tarian tradisional dianggap ketinggalan zaman.
5. Konflik dengan kebijakan dan regulasi, implementasi gerakan cinta tari warisan daerah dapat terkendala oleh konflik dengan kebijakan dan regulasi yang ada. Misalnya, pembatasan tempat atau waktu pertunjukan, birokrasi yang rumit dalam perizinan, atau kurangnya dukungan dari lembaga pemerintah terkait.
6. Tantangan komunikasi dan kolaborasi, ketika melibatkan berbagai pihak, seperti kelompok tari, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta, tantangan dalam komunikasi dan kolaborasi dapat muncul. Koordinasi yang buruk, perbedaan visi atau kepentingan, dan kurangnya kerja sama dapat menghambat kesuksesan gerakan cinta tari.
7. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas: Keberhasilan gerakan cinta tari juga tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, seperti gedung pertunjukan, studio tari, atau tempat pelatihan. Kurangnya fasilitas yang memadai dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan gerakan tersebut.
8. Tantangan Pemasaran dan Promosi: Mempromosikan gerakan cinta tari dan pertunjukan tari tradisional ke khalayak yang lebih luas bisa menjadi tantangan. Dibutuhkan upaya pemasaran yang efektif dan strategi promosi yang kreatif untuk menarik minat dan perhatian masyarakat.
9. Menghadapi permasalahan ini memerlukan strategi yang tepat, seperti upaya penggalangan dana, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak terkait, serta upaya untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas yang ada.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, beberapa upaya yang bisa ditempuh terdiri dari

1. Fokus dan peningkatan pendanaan, yakni perlunya mencari sumber pendanaan tambahan melalui sponsor, donasi atau program pemerintah yang mendukung inovasi pelestarian dan pengembangan seni tari tradisional sehingga bisa memfasilitasi penyelenggaraan pertunjukan, pelatihan, pemenuhan peralatan dan sarana pertunjukan lainnya.

2. Perlunya kampanye kesadaran dan edukasi, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian seni tari tradisional. Mengadakan program edukasi, seminar, lokakarya, diskusi publik tentang seni tari tradisional untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat
3. Pendidikan formal dan nonformal, dengan mendorong pendidikan formal dan non formal seni tari tradisional sebagai bagian dari kurikulum atau program ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Mendukung pendirian lembaga pelatihan tari tradisional/ sanggar/ komunitas dan memfasilitasi program pelatihan generasi muda dan masyarakat umum.
4. Kolaborasi dengan ahli dan pengajar, selain mengoptimalkan tugas dari pelatih yang sudah ada, perlu membangun kerja sama dengan ahli, pengajar, dan tokoh budaya yang kompeten dalam seni tari tradisional. Mengundang mereka untuk memberikan pelatihan, membimbing, dan memberikan wawasan tentang aspek-aspek teknis dan budaya tari tradisional.
5. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas, selain dari yang sudah tersedia dengan melakukan advokasi pembangunan atau pembaruan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung gerakan cinta tari. Ini termasuk gedung pertunjukan, studio tari, ruang pelatihan, perpustakaan, dan arsip budaya untuk melestarikan dokumentasi tari tradisional.
6. Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta yang memiliki minat dalam pelestarian seni tari tradisional. Melalui kerja sama ini, sumber daya dan keahlian dapat digabungkan untuk mendukung dan memperkuat gerakan cinta tari.
7. Melakukan promosi dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan eksposur dan daya tarik seni tari tradisional. Menggunakan media sosial, website, pertunjukan kecil, pameran, dan festival budaya dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas.
8. Evaluasi dan pemantauan secara berkala untuk mengukur keberhasilan implementasi inovasi gerakan cinta tari. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan, partisipasi masyarakat, dan dampak sosial yang dihasilkan untuk mengevaluasi efektivitas program dan menentukan langkah-langkah perbaikan.

2. PENGELOLAAN DAN PEMILAHAN LIMBAH NON MEDIS DENGAN METODE DAUR ULANG MENJADI PAVING BLOCK DAN BATAKO PLASTIK (PAPAH MODIS DALANG BATIK)

2.1 Deskripsi Inovasi

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kemauan, kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi semua lapisan masyarakat sehingga dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Derajat kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang sehat akan meningkatkan produktivitas hidup. Pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan kesehatan menyebabkan kebutuhan terhadap layanan bermutu rumah sakit semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan rumah sakit di Indonesia meningkat pesat belakangan ini. Seiring jumlah rumah sakit yang bertambah setiap tahunnya di Indonesia, maka semakin banyak pula jumlah produksi limbah medis yang dihasilkan. Jika limbah medis tidak dikelola dengan baik, maka kondisi tersebut akan memperbesar kemungkinan potensi limbah rumah sakit dalam mencemari lingkungan serta menularkan penyakit dan juga dapat mengakibatkan kecelakaan kerja (Pertiwi, 2017).

Limbah rumah sakit dibagi menjadi dua kelompok secara umum yaitu limbah medis dan limbah non medis (Pertiwi, 2017). Limbah medis rumah sakit dikategorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti disebutkan dalam Lampiran I PP No. 101 Tahun 2014 bahwa limbah medis memiliki karakteristik infeksius. Limbah B3 dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan juga dampak terhadap kesehatan masyarakat serta makhluk hidup lainnya bila dibuang langsung ke lingkungan. Selain itu, limbah B3 memiliki karakteristik dan sifat yang tidak sama dengan limbah secara umum, utamanya karena memiliki sifat yang tidak stabil, reaktif, eksplosif, mudah terbakar dan bersifat racun.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.56 Tahun 2015 juga menyebutkan Rumah sakit termasuk salah satu fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang meliputi pengurangan dan pemilahan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah B3, penguburan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 di rumah sakit sangat diperlukan karena apabila limbah B3 tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak antara lain: mengakibatkan cedera, pencemaran lingkungan, serta menyebabkan penyakit nosokomial. Pengelolaan limbah B3 rumah sakit yang baik diharapkan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan tersebut. Khususnya di pasal 38 menerangkan pada ayat (1) Kewajiban memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dikecualikan untuk Penghasil Limbah B3 yang melakukan sendiri Pengolahan Limbah B3 berupa ; kemasan bekas B3, spuit bekas, botol infus bekas selain infus darah dan/atau

cairan tubuh; dan/atau bekas kemasan cairan hemodialisis, kemudian pada ayat (2) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui; pengosongan, pembersihan, desinfeksi, dan penghancuran atau pencacahan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Pasal 24 meliputi pada ayat (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan proses pengolahan limbah yang dihasilkan, ayat (2) Selain melaksanakan proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan kegiatan pengelolaan limbah, kemudian pada ayat (6) Limbah non medis atau domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam kategori Limbah B3 dan disebut sebagai Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (7) Selain limbah medis dan non medis atau domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), limbah yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa Limbah non B3, dan pada ayat (8) Limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hasil dari pengolahan Limbah B3 dengan metode disinfeksi dan sterilisasi.

Pada Lampiran PMK No.2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan khususnya pada Bab V yang menerangkan Persyaratan Teknis Proses Pengolahan Limbah dan Pengawasan Terhadap Limbah, Penyelenggaraan pengelolaan limbah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi pengamanan terhadap limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah non B3, air limbah, limbah gas, dan sampah. Pengelolaan Limbah non B3 dan sampah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada butir Pengurangan Limbah B3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan dengan cara salah satunya yakni Pemanfaatan kembali komponen yang bermanfaat (daur ulang) melalui proses tambahan secara kimia, fisika dan atau biologi yang menghasilkan produk yang sama atau berbeda. Material yang dapat didaur ulang antara lain plastik, kertas, kaca, dan logam

Berdasarkan kajian WHO (1999), rata-rata produksi limbah rumah sakit di negara--negara berkembang sekitar 1-3 kg/TT.hari, sementara di negara-negara maju (Eropa, Amerika) mencapai 5-8 kg/TT.hari. Pada tahun 2003, timbulan limbah medis dari Rumah Sakit sekitar 0,14 kg/TT.hari. Komposisi limbah medis ini antara lain terdiri dari: 80% limbah non infeksius, 15% limbah patologi & infeksius, 1% limbah benda tajam, 3% limbah kimia & farmasi, >1% tabung & termometer pecah (Ditjen PP & PL, 2011).

Melansir dari laman Perhimpunan Rumah Sakit di Seluruh Indonesia (Persi), diperkirakan jumlah limbah medis mencapai 493 ton per hari. Sedangkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang memiliki fasilitas pengolahan limbah yang legal dan baik, baru 120 RS dari 2.880 RS

(sebaran dari Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI). Itu berarti daur ulang plastik dan bekas peralatan medis di fasyankes masih kurang efektif.

Permasalahan yang paling fenomenal dalam pengelolaan limbah non medis ini adalah Oknum yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari limbah non medis seperti botol infus dan botol obat yang mempunyai nilai jual yang lumayan sehingga berpotensi tidak dikelola secara standar Peraturan dan Perundangan yang berlaku. Mengutip dari laman Harian detiknews <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5004471/limbah-medis-di-purbalingga-dijual-ilegal-dan-dijadikan-mainan-anak> dan Harian Kompas.com [https://regional.kompas.com/read/2020/05/05/20104551/Waspada, Limbah Medis B3 Diolah Jadi Botol Parfum hingga Mainan Anak](https://regional.kompas.com/read/2020/05/05/20104551/Waspada%2C%20Limbah%20Medis%20B3%20Diolah%20Jadi%20Botol%20Parfum%20hingga%20Mainan%20Anak) (kompas.com) hal ini menggambarkan bahwa masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pengelolaan limbah di beberapa Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya Rumah Sakit. Karena pada dasarnya perihal daur ulang botol infus ini harus melalui beberapa tahapan yang dipersyaratkan oleh Peraturan dan Perundangan yakni diantaranya harus didesinfeksi secara kimia, dicacah dan hasil daur ulang tidak boleh menjadi produk yang berkaitan dengan makanan dan minuman atau non food grade.

Berdasarkan berbagai macam latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka saya tertarik membuat suatu inovasi di bidang Kesehatan lingkungan khususnya mengenai tentang pengelolaan Limbah padat Rumah Sakit dengan Inovasi **“Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis Dengan Metode Daur Ulang Menjadi Paving Blok dan Batako Plastik”**. Dengan harapan terciptanya inovasi ini sedikit banyaknya akan berguna baik untuk di daerah maupun nasional dan saya sebagai Sanitarian turut ikut andil dan bangga melayani bangsa.

Inovasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah yang menekankan pengelolaan limbah Fasyankes dikelola dan diselesaikan secara tuntas di daerah masing-masing tanpa harus diolah di luar wilayahnya sehingga dapat meminimalisir risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan, serta menekan biaya pengelolaan limbah medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Permasalahan pengelolaan limbah Rumah Sakit saat ini yang paling fenomenal yakni permasalahan pengelolaan limbah Infus, spuit bekas, botol obat yang kerap disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga berpotensi pengelolaannya menyalahi aturan dari standar peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga berpotensi menjadi sumber penyakit. Selain itu permasalahan pengelolaan limbah di RSUD Balangan cukup menguras anggaran karena hampir semua jenis limbah medis itu dikelola sehingga akan lebih banyak menggunakan biaya

operasional baik dalam hal pemusnahan dengan Incinerator maupun pengiriman limbah lainnya ke pihak ketiga.

Metode dan strategi pemecahan masalah yakni dengan cara mengelola limbah non medis tersebut seperti limbah infus, spuit, botol obat dan limbah non medis lainnya sendiri secara tuntas di lokasi Rumah Sakit sendiri, yakni dengan cara pemilahan limbah medis dan non medis secara intens, yang dimana limbah medis langsung dimusnahkan di Incinerator sedangkan limbah non medis dikelola khusus dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik, teknik daur ulang menggunakan teknologi fasilitas Incinerator yang dimiliki serta sudah berizin dari KLHK, dengan memanfaatkan panas Incinerator yang melebihi 1.000 derajat celcius dan modifikasi di ruang Incinerator untuk media pelelehan botol infus plastik agar meleleh tanpa kontak dengan limbah medis yang dibakar.

Adapun manfaat dari inovasi PPAH MODIS ini adalah :

- a. Sebagai masukan bagi semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya Rumah Sakit sebagai sumber penghasil limbah non medis terbanyak dari fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya agar limbah dengan jenis non medis tersebut bisa dikelola dengan baik, tidak menjadi beban biaya dan justru menjadi lebih bermanfaat serta ramah lingkungan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemangku kebijakan baik kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas dan Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya dalam mengambil kebijakan khususnya pengelolaan limbah non medis.
- c. Sebagai bahan masukan bagi seluruh tenaga Kesehatan di Fasyankes bahwa pentingnya pemilahan limbah padat dari aktivitas pelayanan Kesehatan, karena salah satu kunci dari proses daur ulang limbah non medis ini adalah pemilahan limbahnya
- d. Karena tidak semua jenis limbah dikelola atau dimusnahkan dengan Incinerator, dapat mengurangi biaya operasional pengelolaan limbah sehingga penggunaan anggaran RSUD Balangan di kegiatan Pengelolaan Limbah menjadi lebih efisien.
- e. Hasil akhir dari daur ulang limbah non medis tersebut yakni berupa paving block dan batako plastik sangat bermanfaat untuk berbagai macam kegunaan, baik digunakan untuk Rumah Sakit sendiri (Rencana untuk membangun TPS Mini Limbah Non Medis dari Batako Plastik) maupun untuk masyarakat (Rencana Paving Block akan disumbangkan ke Panti Asuhan sekitar)
- f. Menurut informasi yang kami ketahui, belum ada Fasyankes bahkan Rumah Sakit Besar di daerah yang mengelola limbah non medisnya dengan pengolahan sendiri secara tuntas dengan metode daur ulang sehingga menghasilkan bahan yang bermanfaat sesuai dengan standar Peraturan dan Perundangan yang berlaku (hasil dari diskusi dan studi banding yang kami ketahui kebanyakan hanya sampai di tahapan desinfeksi dan pencacahan selanjutnya dikirim ke

pihak ketiga). Dan harapannya inovasi ini bisa menjadi percontohan bagi semua Fasyankes khususnya dalam pengelolaan limbah non medis

- g. Dengan diterapkannya Inovasi ini sehingga membantu menyelesaikan berbagai permasalahan limbah Fasyankes yang kerap terjadi penyimpangan oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab, karena Fasyankes khususnya Rumah Sakit sekarang sudah mempunyai solusi yang tepat dalam pengelolaan limbahnya.
- h. Menambah wawasan bagi semua elemen masyarakat bahwa limbah plastik bisa didaur ulang dengan cara yang khusus sehingga sangat membantu mengurangi permasalahan lingkungan.
- i. Terobosan baru khususnya bagi sanitarian rumah sakit dalam menjalankan tugas kenegaraan ini sehingga sanitarian sebagai tenaga kesehatan bangga melayani bangsa.

2.2 Data Perubahan

Tabel 5. Perubahan Inovasi PAPA MODIS DALANG BATIK

Indikator	Deskripsi Perubahan
Jumlah penerima manfaat inovasi PAPA MODIS DALANG BATIK	Jumlah penerima manfaat inovasi PAPA MODIS DALANG BATIK diasumsikan sebagai seluruh karyawan BLUD RSUD Balangan tahun 2022 yakni sebanyak 546 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 117 orang, PTT sebanyak 411 orang dan PPPK sebanyak 18 orang.
Volume sampah non medis RSUD Balangan yang diolah dan didaur ulang menjadi paving dan batako plastik	Sampah yang menjadi prioritas didaur ulang adalah botol infus yang dihasilkan oleh RSUD Balangan. Timbulan sampah non medis botol infus cukup besar dimana tahun 2022 adalah sebanyak 304 kg.. Banyaknya timbulan sampah botol infus menjadi potensi bahan baku untuk diolah dan didaur ulang menjadi paving dan batako.
Jumlah efisiensi/ pengurangan sampah/ limbah non medis yang berhasil dikelola dan didaur ulang	Dampak dari penerapan inovasi ini diantaranya dari segi anggaran akan lebih efisien dan hemat karena tidak semua limbah medis dimusnahkan menggunakan incinerator dan otomatis mengurangi biaya operasional pengelolaan limbah, selain itu dampaknya adalah mengurangi kasus penyimpangan dan penyalahgunaan limbah non medis yang berpotensi menyebarkan penyakit sehingga merupakan salah satu cara pencegahan penyebaran penyakit akibat penyimpangan limbah medis
Jumlah produksi daur ulang sampah non medis menjadi paving dan batako plastik	Hasil produksi daur ulang sampah non medis botol infus diperoleh hasil yakni sebanyak 44 buah paving block dan 34 batako plastik. Orientasi saat ini adalah untuk digunakan sendiri belum dijual. Apabila sudah dikomersialkan/ dijual keluar maka akan ada keuntungan ekonomi yang diperoleh RSUD dan berpotensi menjadi pendapatan.
Penciptaan lapangan kerja	Saat ini jumlah pengelola adalah sebanyak 9 (sembilan) orang tim PAPA MODIS DALANG BATIK, namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya kerjasama, perluasan pelayanan dan pengolahan sampah non medis secara kolektif dari puskesmas maka kapasitas produksi paving dan batako membutuhkan tenaga kerja lebih banyak dan meningkatkan/ membuka kesempatan kerja yang lebih luas lagi.
Indeks kualitas lingkungan hidup	Sebagai salah satu cara pengelolaan sampah non medis dalam rangka mengurangi volume sampah non medis secara

Indikator	Deskripsi Perubahan
	tidak langsung menyumbang positif terhadap peningkatan indeks kualitas lingkungan Hidup dimana untuk tahun 2020 adalah 65,93, yang meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 67,35. Secara lebih rinci data tahun 2021 yakni indeks kualitas air sebesar 51,33, indeks kualitas udara 91,93, dan indeks kualitas lahan 51,6. Di tahun 2022 indeks kualitas air 50,2, indeks kualitas udara 91,05 dan indeks kualitas lahan 53,99 (dimana yang mengalami peningkatan adalah indeks kualitas lahan)

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2.3 Analisis Dampak

Dari petunjuk teknis inovasi PAPA MODIS DALANG BATIK yang dilaporkan lingkup kegiatan PAPA MODIS adalah meliputi

- Penyiapan petugas pelaksana lapangan
- Penyiapan tempat pemilahan limbah non medis
- Penyuluhan langsung ke petugas kesehatan di semua ruangan perawatan
- Pengangkutan limbah non medis
- Penyimpanan dan pemotongan limbah
- Desinfektan limbah non medis yang akan didaur ulang
- Pelelehan dan pencetakan hasil daur ulang

Sampah non medis rumah sakit sebaiknya tidak langsung dibuang ke TPA karena mengandung bahan potensi berbahaya, seperti infeksius, bahan kimia, beracun atau bahan tajam. Oleh karena itu memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dengan sampah rumah tangga. Sehingga RSUD disarankan melakukan pengolahan internal seperti penghancuran, sterilisasi untuk mengurangi resiko penularan penyakit, dan melakukan daur ulang menjadi bahan bakar alternatif. Namun RSUD Kabupaten Balangan menemukan inovasi pengolahan limbah non medis menjadi produk lain yakni paving dan batako plastik, dengan sebelumnya memastikan bahan tersebut tidak infeksius lagi melalui disinfektan dengan chlorin sehingga aman sesuai baku mutu lingkungan. Adapun tahapan pelaksanaan inovasi PAPA MODIS DALANG BATIK adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan persiapan kegiatan pengelolaan dan pemilahan limbah non medis agar tersusun dengan sistematis dan terarah;
- Melaksanakan penyuluhan dan informasi ke setiap tenaga kesehatan perihal pemilahan limbah medis agar terpilah dengan semestinya;
- Melaksanakan pengawasan pemilahan di setiap ruangan untuk memastikan terpilahnya limbah non medis yang akan didaur ulang;
- Melaksanakan Penyimpanan dan Pemotongan limbah non medis seperti botol infus dan limbah non medis lainnya yang berbahan plastik;

- e. Melaksanakan desinfeksi dengan menggunakan Chlorin 0,5% agar memastikan bahan daur ulang dari limbah non medis tersebut sesuai dengan baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan;
 - f. Melaksanakan proses pelelehan dengan bantuan dan modifikasi alat Incinerator;
 - g. Melaksanakan proses pencetakan dari lelehan infus yang sudah dibuat dengan menggunakan alat Cetak Paving Block dan Batako Plastik;
 - h. Melaksanakan pemasangan botol-botol obat menjadi ornamen dinding;
 - i. Melaksanakan perlakuan akhir seperti pembersihan, pengecatan dan dekorasi agar hasil daur ulang terlihat menarik;
 - j. Mengevaluasi hasil dari layanan lansia pada akses/daerah terpencil;
 - k. Melaporkan kepada atasan jika ada permasalahan terkait pelaksanaan Inovasi PAPA MODIS
- DALANG BATIK

Di dalam penerapan/ implementasi inovasi PAPA MODIS beberapa hal yang harus dipersiapkan diantaranya adalah penyusunan kebijakan dan perencanaan teknis, RSUD harus mempunyai perencanaan pengelolaan sampah yang mencakup tujuan, strategi, dan rencana tindak/ aksi pengelolaan sampah secara berkelanjutan termasuk penggunaan metode daur ulang. Kemudian perlu mempersiapkan infrasturktur dan peralatan untuk mengelola sampah non medis dengan daur ulang, termasuk sarana area pemilahan sampah, fasilitas daur ulang, dan peralatan yang diperlukan dalam proses pengolahan sampah.

Pelaksanaan program inovasi ini harus memperhatikan sumber daya pengelola yang cakap dan terampil dalam menjalankan pengelolaan daur ulang sampah non medis. Perlu diperhatikan penerapan sistem pengumpulan dan pemilahan sampah, dengan prosedur pemilahan sampah yang jelas, kecukupan tempat sampah, diikuti kesadaran tinggi dan keterlibatan dari semua unsur dan pelaku inovasi. Keberlanjutan operasional pengolahan dan potensi peningkatan efisiensi dari inovasi daur ulang. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan selama pelaksanaan program pengolahan dan daur ulang sampah non medis. Kesadaran lingkungan dan keterlibatan dari pihak eksternal juga diperlukan, dalam hal ini menentukan pengguna dari produk daur ulang. Selain itu dengan manajemen keuangan dari hasil penjualan produk daur ulang yang dapat menjadi potensi pendapatan dan mendorong kemandirian keuangan pelaksanaan program inovasi.

Pengolahan sampah non-medis dengan metode daur ulang menjadi paving dan batako plastik memiliki beberapa manfaat yang signifikan:

- a. Pengurangan sampah dan limbah

Daur ulang sampah non-medis menjadi paving dan batako plastik membantu mengurangi jumlah sampah non medis yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau berakhir sebagai limbah yang mencemari lingkungan. Dengan menggunakan kembali sampah plastik, jumlah sampah yang harus dibuang menjadi lebih sedikit.

b. Mendukung program konservasi sumber daya alam

Proses daur ulang memungkinkan penggunaan kembali bahan-bahan yang sudah ada tanpa harus menghasilkan bahan baru dari sumber daya alam. Dengan mengolah sampah plastik menjadi paving dan batako plastik, penggunaan bahan-bahan seperti tanah liat atau batu bata tradisional dapat dikurangi, sehingga membantu dalam konservasi sumber daya alam yang terbatas.

c. Pengurangan emisi gas rumah kaca

Daur ulang sampah plastik menjadi paving dan batako plastik mengurangi kebutuhan akan produksi plastik baru yang melibatkan proses produksi yang beremisi tinggi. Dengan mengurangi produksi plastik baru, emisi gas rumah kaca dari industri plastik dapat berkurang, sehingga membantu dalam mitigasi perubahan iklim.

d. Peningkatan kualitas infrastruktur

Paving dan batako plastik yang dihasilkan dari daur ulang sampah plastik memiliki daya tahan yang baik dan mampu digunakan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, trotoar, atau bangunan. Penggunaan bahan daur ulang ini dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperpanjang masa pakai, serta mengurangi kebutuhan akan bahan konstruksi konvensional.

e. Penanggulangan masalah sampah

Dengan mengolah sampah non-medis menjadi produk yang bernilai seperti paving dan batako plastik, kita dapat melihat sampah sebagai sumber daya yang berpotensi, bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang. Pendekatan ini membantu dalam penanggulangan masalah sampah dengan mengubah pandangan masyarakat terhadap sampah dan mendorong siklus yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.

f. Penciptaan lapangan kerja

Industri daur ulang dan pengolahan sampah plastik menjadi paving dan batako plastik dapat menciptakan lapangan kerja baru, baik dalam proses pengolahan sampah maupun produksi bahan daur ulang. Ketika kegiatan inovasi ini bisa diadopsi dan disebarluaskan, tentunya lebih banyak tenaga kerja yang akan terserap di dalamnya, hal ini berkontribusi pada perekonomian lokal dan membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Selama ini dalam mengukur keberhasilan penerapan inovasi PAPAH MODIS DALANG BATIK telah dilakukan monitoring evaluasi internal oleh RSUD Balangan dengan hasil monev adalah 1) inovasi ini memerlukan SDM yang handal dan berpengalaman, 2) tenaga pelaksana harus rutin medical check up (pemeriksaan kesehatan) karena paparan dari cemaran infeksi sampah non medis, 3) alat dan bahan yang dipergunakan dalam menunjang inovasi perlu pengembangan lebih lanjut, 4) bahan yang didaur ulang harus rutin di evaluasi atau diperiksa angka/ kadar kumannya guna memastikan keamanan dan standar mutu, 5) perlu penjalinan lintas sektor yang lebih luas agar inovasi ini semakin berkembang, 6) hasil daur ulang perlu diuji coba atau uji ketahanan, 7) rutin memperbarui peraturan perundang-undangan/ regulasi khususnya terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Inovasi PAPAH MODIS DALANG BATIK pengolahan sampah non-medis dengan metode daur ulang menjadi paving dan batako plastik dalam melakukan evaluasi keberhasilan programnya dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikator berikut:

- a. Mengukur volume sampah yang diolah, dengan pencatatan dan pemantauan jumlah sampah yang masuk ke dalam proses daur ulang serta hasil yang dihasilkan dalam bentuk paving dan batako plastik.
- b. Kualitas produk daur ulang paving dan batako plastik yang dihasilkan dari sampah non-medis. Hal ini dapat mencakup uji kekuatan, daya tahan, dan kecocokan dengan standar teknis yang berlaku untuk produk tersebut.
- c. Mengukur efisiensi proses daur ulang secara keseluruhan, mulai dari tahap pengumpulan sampah hingga produksi paving dan batako plastik. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengukur waktu, energi, atau sumber daya lain yang dibutuhkan dalam setiap tahapan proses.
- d. Mengukur pengurangan sampah non medis yang dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA). Perbandingan antara jumlah sampah yang dikelola dengan metode daur ulang dan sampah yang dibuang dapat memberikan gambaran tentang tingkat pengurangan limbah yang tercapai.
- e. Analisis siklus hidup dan jejak karbon, melakukan analisis siklus hidup dan perhitungan jejak karbon dari proses daur ulang sampah non-medis menjadi paving dan batako plastik. Mengukur pengurangan emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan lainnya yang terkait dengan inovasi ini.
- f. Evaluasi keuangan, yakni mengukur aspek keuangan dari penerapan inovasi ini, termasuk biaya produksi, pendapatan dari penjualan paving dan batako plastik, dan potensi penghematan dalam pengelolaan sampah.
- g. Penilaian kepuasan pengguna, dengan melakukan survei SKM untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna paving dan batako plastik, seperti kontraktor konstruksi atau pihak yang menggunakan produk tersebut. Evaluasi kepuasan pengguna dapat memberikan wawasan tentang kualitas dan performa produk daur ulang.

- h. Penyebaran/ difusi inovasi dan replikasi, yakni mengukur tingkat penyebaran inovasi ini ke daerah lain dan potensi replikasi dalam konteks lain. Jumlah proyek atau lokasi yang mengadopsi metode pengolahan sampah non-medis menjadi paving dan batako plastik dapat dijadikan indikator keberhasilan penyebaran inovasi.

Dalam penerapan inovasi pengolahan sampah non-medis dengan metode daur ulang menjadi paving dan batako plastik, terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi, antara lain:

- a. Sumber sampah yang terbatas, yakni ketersediaan sumber sampah yang cukup untuk diolah menjadi paving dan batako plastik. Jika pasokan sampah non-medis terbatas, maka produksi paving dan batako plastik juga akan terbatas.
- b. Kualitas dan konsistensi sampah non-medis juga dapat menjadi kendala. Sampah non-medis yang tercampur dengan bahan lain atau terkontaminasi dapat mempengaruhi kualitas dan daya tahan paving dan batako plastik yang dihasilkan.
- c. Teknologi dan peralatan, dimana penerapan inovasi ini membutuhkan teknologi dan peralatan yang sesuai untuk mengolah sampah non-medis menjadi paving dan batako plastik. Tersedianya teknologi yang tepat dan peralatan yang efisien dapat menjadi tantangan, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi dan industri.
- d. Perizinan dan regulasi terkait pengolahan sampah dapat menjadi kendala dalam penerapan inovasi ini. Proses perizinan yang rumit, persyaratan lingkungan yang ketat, atau ketidakjelasan peraturan dapat mempengaruhi kelancaran dan keberlanjutan operasional inovasi ini.
- e. Pendidikan dan kesadaran masyarakat, dimana rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terkait manfaat daur ulang dan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat menjadi kendala. Kesadaran yang kurang dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memisahkan sampah non-medis dan mendukung upaya pengolahan sampah menjadi paving dan batako plastik.
- f. Keberlanjutan keuangan, yang menjadi tantangan dalam penerapan inovasi ini. Investasi awal dalam teknologi dan peralatan, biaya operasional, serta pendapatan yang dihasilkan dari penjualan paving dan batako plastik harus seimbang agar penerapan inovasi ini dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.
- g. Penerimaan dan penggunaan produk daur ulang oleh pasar dan industri konstruksi juga dapat menjadi kendala. Jika pasar tidak menerima produk ini atau jika tidak ada permintaan yang cukup, maka kesinambungan penerapan inovasi ini menjadi terhambat.

Sementara itu untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam penerapan inovasi pengolahan sampah non-medis menjadi paving dan batako plastik, berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan:

- a. Kerjasama dengan pihak terkait yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, industri konstruksi, dan komunitas setempat. Melibatkannya dalam proses perencanaan, implementasi, dan pemantauan inovasi ini dapat membantu mengatasi kendala serta memperoleh dukungan yang diperlukan.
- b. Pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat daur ulang sampah non-medis menjadi paving dan batako plastik. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan dampak positif dari penggunaan produk daur ulang.
- c. Pengembangan infrastruktur dan teknologi untuk pengolahan sampah non-medis menjadi paving dan batako plastik. Mengadopsi teknologi yang efisien dan ramah lingkungan untuk proses daur ulang. Dalam hal ini, kerjasama dengan pihak industri dan teknologi dapat membantu dalam mengatasi kendala teknologi dan peralatan.
- d. Dukungan Kebijakan dan regulasi dapat mencakup insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan pengurangan hambatan administratif untuk industri pengolahan sampah dan produsen batako dan paving plastik.
- e. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang cara memisahkan sampah dan mengumpulkannya agar memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk proses daur ulang menjadi paving dan batako plastik.
- f. Pengembangan pasar dan jaringan untuk membangun pasar yang berkelanjutan dan jaringan distribusi yang luas untuk produk paving dan batako plastik dengan melibatkan pihak industri konstruksi, arsitek, dan pengembang properti dalam penggunaan produk ini serta memperkuat kerjasama dengan produsen dan distributor.
- g. Penelitian dan inovasi lanjutan dalam pengolahan sampah non-medis menjadi paving dan batako plastik. Mengembangkan metode produksi yang lebih efisien, meningkatkan kualitas produk, dan mengeksplorasi potensi penggunaan sampah non-medis lainnya.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi inovasi ini. Mengukur kinerja, efektivitas, dan dampak lingkungan dari penerapan pengolahan sampah menjadi paving dan batako plastik, serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

3. APLIKASI ELEKTRONIK KINERJA ORGANISASI (E-KINO) REFORMASI BIROKRASI

3.1 Deskripsi Inovasi

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja, Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan sudah selaras dengan RPJMD 2021-2026. Lambatnya perkembangan reformasi birokrasi (RB) di Kabupaten Balangan sangatlah dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain seperti minimnya pemahaman dan kesadaran Aparatur Sipil Negara mengenai RB untuk melakukan pembenahan pada sistem birokrasi itu sendiri. Kualitas Aparatur Sipil Negara yang dinilai kurang cakap dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dapat menghambat perkembangan RB itu sendiri

Pada tahun 2021 Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) masih berlanjut bahkan ditemukan varian baru yang berasal dari India (Delta), yang membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, hampir tak ada yang bisa berkecil dari kemunculan virus Covid-19 ini, tidak terkecuali terhadap lambatnya pelaksanaan RB. Dalam rangka memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja, memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan efektif, dan melindungi ASN dari resiko penularan Covid-19, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan RB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, menegaskan akan pentingnya penerapan *clean government* dan *good governance* secara universal yang menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan 8 area perubahan dan 1 program Quick Wins RB Area Manajemen Perubahan (Bidang Pola Pikir dan Budaya Kerja), Area Derigulasi Kebijakan, Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Ketatalaksanaan, Area Penataan Sistem

Manajemen Sumber Daya. Manusia (SDM) Aparatur, Area Penguatan Pengawasan, Area Penguatan Akuntabilitas, Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Program *Quick Wins*. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Balangan tidak hanya sebagai wujud pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Reformasi Birokrasi semata, namun merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan birokrasi yang berbasis kinerja, RB harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pelaksanaan RB pada periode sebelumnya.

Guna mewujudkan birokrasi yang berbasis pada kinerja, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan RB, diantaranya dengan proses monitoring dan evaluasi (monev) secara internal dan eksternal. Monev secara internal dilakukan melalui pemantauan terhadap rencana kerja (*working plan*) yang ditindaklanjuti melalui kegiatan-kegiatan perbaikan RB disetiap area perubahan dan program quick wins serta penilaian pelaksanaan RB secara mandiri (PMPRB) yang didasarkan pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan menginisiasi pembuatan aplikasi berbasis informasi teknologi untuk **memudahkan pengontrolan data kinerja pada beberapa area perubahan reformasi birokrasi**. Aplikasi ini dirancang dengan sebuah sistem berbasis microsoft sql.

Sehingga dalam rangka mempermudah pengawasan data realisasi dan capaian kinerja SKPD pada beberapa area perubahan Reformasi Birokrasi yakni Akuntabilitas, Manajemen Perubahan/Budaya Kerja, Penataan Organisasi, Diregulasi Kebijakan dan Pelayanan Publik maka diperlukan intervensi inovasi EKINO.

Berdasarkan data hasil LHE Penilaian Reformasi Birokrasi Pemda Balangan Tahun 2020, Permasalahan utama implementasi reformasi birokrasi Pemda Balangan jika dikaitkan dengan ketersediaan aplikasi adalah sebagai berikut :

1. Penerapan reformasi birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat pemerintah kabupaten, penerapan pada tingkat perangkat daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal. Aspek pemenuhan data dukung RB pun masih dikategorikan minim.
2. Pemenuhan data dukung dan implementasi nyata area perubahan pada level SKPD masih belum menggambarkan hasil yang diharapkan.

Lambatnya perkembangan Reformasi Birokrasi (RB) di Kabupaten Balangan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain; 1) minimnya pemahaman dan kesadaran Aparatur Sipil Negara mengenai RB untuk melakukan pembenahan pada sistem birokrasi itu sendiri, 2) kualitas Aparatur Sipil Negara yang dinilai kurang cakap dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dapat

menghambat perkembangan RB itu sendiri. Selain itu tahun 2021 Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Perubahan tersebut memengaruhi semua sepele mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari. Hal tersebut berdampak pula terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berjalan lambat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Balangan tidak hanya sebagai wujud pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Reformasi Birokrasi semata, namun merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan birokrasi yang berbasis kinerja, RB harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pelaksanaan RB pada periode sebelumnya. Guna mewujudkan birokrasi yang berbasis pada kinerja, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan RB, diantaranya dengan proses monitoring dan evaluasi (monev) secara internal dan eksternal. Monev secara internal dilakukan melalui pemantauan terhadap rencana kerja (working plan) yang ditindaklanjuti melalui kegiatan-kegiatan perbaikan RB di setiap area perubahan dan program quick wins serta penilaian pelaksanaan RB secara mandiri (PMPRB) yang didasarkan pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Permasalahan yang terjadi adalah realisasi dan capaian kinerja beberapa area perubahan Reformasi Birokrasi selama ini tidak tersistem dan belum ada rutinitas monev terjadwal sehingga data kegiatan SKPD terkait Reformasi Birokrasi SKPD masih belum tertib, terlebih data dukung terkait pelaksanaan kegiatan.

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan Langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Instansi pemerintah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas fleksibel tanpa batas.

Disediakan aplikasi online untuk SKPD entri realisasi dan capaian kinerja Reformasi Birokrasi SKPD dan juga ada menu upload data dukung sehingga dapat tersimpan secara cloud di sistem apabila data dukung tersebut telah diverifikasi oleh Tim.

Tujuan dari dirancangnya aplikasi microsoft sql aplikasi E-Kino ini adalah :

10. Memudahkan kontrol pencapaian target kinerja SKPD khususnya pada area akuntabilitas;
11. Memudahkan terintegrasinya data kinerja area penataan organisasi, area manajemen perubahan, area pelayanan publik dan area akuntabilitas serta arah pengembangan kedepan area tata laksana; dan
12. Menjadi Bank Data Online Cloud System karena seluruh data dukung terkait penilaian kinerja SKPD terdapat dalam satu alamat web aplikasi

Manfaat atau dampak hilir realisasi dan capaian kinerja Reformasi Birokrasi SKPD dapat dipantau sehingga dapat melakukan pembinaan terhadap objek capaian yang masih rendah, selain itu nilai indeks kelembagaan dan indeks budaya kerja SKPD juga dapat dihasilkan secara sistem. Manfaat dibangunnya aplikasi EKINO adalah realisasi dan capaian kinerja RB SKPD dapat dipantau sehingga dapat melakukan pembinaan terhadap obyek capaian yang masih rendah, selain itu nilai indeks kelembagaan dan indeks budaya kerja SKPD juga dapat dihasilkan secara sistem serta feedback janji perbaikan pelayanan atas hasil SKM tahun sebelumnya.

Keunggulan atau kebaruan dari aplikasi E-Kino adalah realisasi dan capaian kinerja dapat dipantau sehingga pembinaan terhadap objek capaian yang masih rendah dapat dilakukan. Keunggulan atau kebaruan lain adalah sistem pada aplikasi ini dapat secara langsung menghasilkan nilai indeks budaya kerja SKPD.

Tahapan inovasi pada aplikasi E-Kino adalah sebagai berikut:

- a. Membuka website ekino.balangkab.go.id
- b. Login
- c. Memilih menu. Menu yang tersedia ada menu area manajemen perubahan, menu area penataan organisasi, menu area pelayanan public, menu area penguatan akuntabilitas, menu area tata laksana.
- d. Untuk keluar, tekan logout.

Sedangkan untuk pengelolaan data kinerja pada aplikasi EKino adalah sebagai berikut: \

- a. Pengumpulan data kinerja RB oleh bidang teknis.
- b. Mengentry data kinerja sesuai area RB oleh admin SKPD
- c. melakukan verifikasi data oleh Admin Kabupaten
- d. Melakukan publish data kepada atasan oleh admin kabupaten
- e. Menyajikan data informasi dalam web oleh Kabag Organisasi

Hasil dari dibangunnya aplikasi e-Kino adalah untuk mempermudah pengawasan data realisasi dan capaian kinerja SKPD pada beberapa area perubahan Reformasi Birokrasi yakni Akuntabilitas, Manajemen Perubahan/Budaya Kerja, Penataan Organisasi, Tata Laksana, Diregulasi Kebijakan dan Pelayanan Publik dan kontrol hasil SKM SKPD setiap bulan.

3.2 Data Perubahan

Tabel 6. Perubahan Inovasi EKINO

Indikator	Deskripsi Perubahan
Prosentase pengguna/ penerima aplikasi EKINO	64 orang yang terdiri dari 4 orang admin kabupaten dari sekretariat daerah (Area Akuntabilitas, Area Manajemen Perubahan, Area Penataan Organisasi dan Area Pelayanan Publik) dan 60 admin SKPD yang terdiri dari kasubag perencanaan dan pelaporan serta kasubag umum dan kepegawaian. Dari 64 orang perwakilan SKPD dan kecamatan yang menjadi penerima aplikasi EKINO sebesar 100% sudah menggunakannya dengan baik, yakni melakukan penginputan data dan dilakukan pengukuran terhadap area manajemen perubahan, penataan organisasi, pelayanan publik, penguatan akuntabilitas dan area tata laksana (pengembangan).
Hasil evaluasi atau akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan	Tahun 2020 hasil evaluasi atau akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Balangan adalah 66,04% predikat B, tahun 2021 hasil evaluasi atau akuntabilitas kinerja adalah 66,67% predikat B, tahun 2022 hasil evaluasi atau akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Balangan adalah 67,04 predikat B artinya implementasi akuntabilitas kinerja “BAIK” yaitu implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Namun demikian hasil evaluasi tahun 2022 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan PermenPANRB 88/2021 terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level PD
Tingkat efisiensi	Efisiensi diukur dari membandingkan waktu, tenaga kerja, dan sumber daya lain yang dibutuhkan sebelum dan setelah penggunaan aplikasi. Awalnya proses pengumpulan dan pelaporan kinerja perangkat daerah dilakukan secara manual dengan mengisi form, mencetak dan menyerahkan kepada unit organisasi yang kemudian mengevaluasi dan memverifikasi. Di dalam prosesnya memerlukan waktu dan biaya. Dengan menggunakan aplikasi EKINO pelaporan cukup dilakukan dengan input data sesuai area RB, dan evaluasi dapat lebih cepat dilakukan. Selain itu dalam pelaporan secara manual ada biaya yang harus dikeluarkan yakni kertas, ATK dan biaya pengiriman yang dapat ditekan/ dihapus ketika sudah menggunakan aplikasi EKINO. Selaras dengan yang disebutkan di dalam SOP bahwa pada tahapan pengelolaan data kinerja membutuhkan waktu 6 jam, yang dinilai sangat efisien.
Hasil rekapitulasi input data pada	Indikator yang dinilai sudah/ sudah sebagian/ belum dalam

Indikator	Deskripsi Perubahan
aplikasi EKINO TW III dan IV tahun 2021	penginputan data adalah terdiri dari jumlah inputan program, kegiatan, sub kegiatan EKINO PK baru, penetapan IKU SKPD, LHE Rencana Aksi 2021, inputan indikator di tujuan, inputan di indikator sasaran, inputan data pada program, inputan data pada kegiatan, inputan data pada sub kegiatan

Sumber : Hasil Analisis, tahun 2022

3.3 Analisis Dampak

Reformasi birokrasi yang berhasil adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan layanan publik dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Tercermin di dalam penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi, meminimalisir birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik; Pemangkasan birokrasi menjadi lebih efisien dan membebaskan proses administrasi dari beban yang tidak perlu yang dapat ditempuh dengan menghilangkan prosedur berbelit, menggabungkan lembaga yang tumpang tindih dan memangkas pegawai yang kurang berkinerja; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas diantaranya dengan mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan yang transparan, penerapan standar etika ketat dan pendirian lembaga pengawasan independen untuk memeriksa kinerja pemerintahan; peningkatan kapasitas dan pelatihan pegawai agar mampu memberikan pelayanan publik lebih baik lagi; pemberdayaan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan, memberikan ruang bagi partisipasi publik dan mendengarkan aspirasi dan masukan masyarakat; penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menindak praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan; dan evaluasi monitoring berkala.

Pengukuran keberhasilan implementasi EKINO yakni inovasi aplikasi pengukuran kinerja organisasi reformasi birokrasi perangkat daerah dapat menggunakan beberapa metode dan indikator berikut:

1. Jumlah dan jenis fitur baru, bahwa aplikasi EKINO menyajikan fitur-fitur baru yang telah diimplementasikan dalam aplikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengukuran kinerja. Misalnya, fitur pengumpulan data secara otomatis, visualisasi data interaktif, atau integrasi dengan sistem lain.
2. Tingkat adopsi, yakni mengidentifikasi tingkat diadopsi/ inovasi digunakan oleh perangkat daerah yang berpartisipasi dalam reformasi birokrasi. Dikalkulasi jumlah pengguna yang menggunakan aplikasi secara rutin dan memantau tingkat penggunaan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini sudah dilakukan sebagaimana data perubahan tabel tersebut diatas.
3. Terjadinya efisiensi proses pengukuran kinerja organisasi. Perbandingan waktu, tenaga kerja, dan sumber daya lain yang dibutuhkan sebelum dan setelah penggunaan aplikasi. Implementasi

aplikasi EKINO mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kinerja.

4. Ketepatan data, bahwa aplikasi EKINO dapat menyajikan data kinerja yang akurat dan dapat dipercaya. Evaluasi kualitas data yang dihasilkan oleh aplikasi dan bandingkan dengan metode pengukuran kinerja sebelumnya. Perlunya mengidentifikasi aplikasi EKINO dapatkah mengurangi kesalahan input atau kehilangan data.
5. Respons pengguna, dapat diperoleh dari pelaksanaan survei kepuasan pengguna atau wawancara dengan pengguna aplikasi untuk mendapatkan masukan dan umpan balik tentang pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi. Tinjau tingkat kepuasan dan kemudahan penggunaan aplikasi ini serta sejauh mana aplikasi ini memenuhi kebutuhan mereka dalam mengukur kinerja organisasi. Survei kepuasan masyarakat berpedoman dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Dampak reformasi birokrasi, cara mengukur keberhasilan implementasi EKINO adalah melakukan evaluasi untuk mengukur dampak positif yang dihasilkan oleh penggunaan aplikasi ini terhadap reformasi birokrasi perangkat daerah secara keseluruhan. Misalnya mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, atau mengurangi/ penyederhanaan birokrasi yang berlebihan.

Di dalam implementasi aplikasi EKINO dalam pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah dapat memberikan beberapa manfaat efisiensi, antara lain:

1. Pengumpulan dan pemrosesan data yang lebih cepat
Aplikasi EKINO memungkinkan pengumpulan data kinerja secara otomatis melalui input elektronik, seperti formulir online atau integrasi dengan sistem lain. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data secara manual, mempercepat proses pengumpulan data, dan mengurangi risiko kesalahan manusia.
2. Automatisasi tugas-tugas rutin
Yakni melalui aplikasi EKINO dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin terkait pengukuran kinerja, seperti penghitungan indikator kinerja atau pembuatan laporan. Hal ini mengurangi keterlibatan manusia dalam tugas-tugas yang dapat dilakukan secara otomatis, sehingga menghemat waktu dan tenaga kerja yang sebelumnya diperlukan.
3. Akses data yang lebih mudah dan cepat
Karena dengan aplikasi EKINO, data kinerja dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pihak yang berwenang. Tidak perlu lagi mencari data secara manual di berkas fisik atau menghubungi

departemen terkait. Akses yang lebih efisien terhadap data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan informasi yang lebih akurat.

4. Penghematan sumber daya,

yakni mengurangi keterlibatan manusia dalam proses pengukuran kinerja, aplikasi elektronik dapat membantu menghemat sumber daya organisasi, seperti waktu, tenaga kerja, dan kertas. Ini dapat mengurangi biaya yang terkait dengan proses manual dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Peningkatan komunikasi dan kolaborasi

Aplikasi EKINO juga memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai bagian dalam organisasi perangkat daerah. Informasi kinerja dapat dibagikan dengan cepat dan mudah, memungkinkan tim untuk bekerja sama secara efisien dalam memperbaiki kinerja organisasi.

Sementara itu diprediksi dalam penerapan inovasi EKINO akan menghadapi beberapa permasalahan diantaranya adalah :

1. Ketersediaan sumber daya, dimana dalam membangun aplikasi membutuhkan investasi signifikan terkait sumber daya (finansial dan teknologi). SKPD mungkin menghadapi keterbatasan anggaran atau infrastruktur yang membatasi kemampuan mereka untuk melaksanakan implementasi yang efektif.
2. Kurangnya pemahaman dan keterampilan, dalam pengaplikasian EKINO memerlukan pemahaman dan keterampilan yang memadai dari pihak pengguna. Jika pengguna tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang penggunaan aplikasi atau kurangnya pelatihan yang memadai, maka implementasi tidak akan berhasil. Pelatihan dan pendampingan yang memadai perlu disediakan untuk memastikan penggunaan yang efektif.
3. Resistensi perubahan, pengguna aplikasi EKINO mungkin tidak merasa nyaman dengan perubahan yang dihadirkan. Kekhawatiran tentang kehilangan pekerjaan atau ketidakpastian dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi aplikasi baru. Penting untuk mengelola perubahan dengan baik, melibatkan pihak-pihak terkait, dan menjelaskan manfaat yang akan diperoleh.
4. Kesesuaian dengan kebijakan dan regulasi, hal ini dapat melibatkan penyesuaian atau pengembangan kebijakan baru untuk mendukung implementasi aplikasi. Jika tidak dilakukan dengan benar, hal ini dapat menghambat atau memperlambat implementasi.
5. Keamanan dan privasi data, di dalam pengumpulan dan pengolahan data kemungkinan terdapat data sensitif. Keamanan dan privasi data harus diutamakan dalam implementasi aplikasi ini. Perlindungan data, kebijakan keamanan yang kuat, dan langkah-langkah pengamanan teknis perlu diimplementasikan untuk melindungi data dari ancaman dan penyalahgunaan.

6. Kompatibilitas dan integrasi, implementasi aplikasi inovatif mungkin melibatkan integrasi dengan sistem yang sudah ada atau menggantikan sistem yang lama. Kompatibilitas dengan infrastruktur teknologi yang ada dan integrasi yang lancar dengan sistem lainnya merupakan faktor penting untuk keberhasilan implementasi.

Mengatasi permasalahan ini memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dukungan kepemimpinan yang kuat, dan kerjasama antara pihak-pihak terkait. Pendekatan yang berfokus pada pengguna, pelatihan yang memadai, dan evaluasi yang terus-menerus juga penting dalam menghadapi permasalahan dan memastikan keberhasilan implementasi inovasi aplikasi pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah. Secara lebih rinci upaya penanganan permasalahan tersebut diawali dengan identifikasi permasalahan dan tantangan, mengidentifikasi kebutuhan, kesulitan teknis atau masalah penggunaan yang mungkin terjadi. Dilanjutkan dengan pengembangan dan peningkatan/ upgrade aplikasi pelaporan kinerja perangkat daerah, dengan sebelumnya mengumpulkan feedback dari pengguna aplikasi untuk memperbaiki dan mengembangkan aplikasi, mengintegrasikan dengan fitur yang lebih intuitif, fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait cara menggunakan dan memanfaatkan aplikasi pelaporan dan penilaian kinerja perlu dilakukan sesi pelatihan reguler dan edukasi pengguna aplikasi dengan menyediakan sumber daya pendukung, panduan pengguna dan video tutorial. Dalam rangka mendorong keberhasilan penggunaan aplikasi dan menyelesaikan permasalahan pengembangan dan implementasi inovasi perlu komunikasi dan partisipasi dari pengambil kebijakan/ pemangku kepentingan yakni mengkomunikasikan manfaat dan tujuan aplikasi secara jelas, mendengarkan masukan dan memperhatikan kebutuhan dan harapan mereka. Terhadap pengaduan, pertanyaan terkait masalah teknis yang terjadi harus disediakan saluran komunikasi khusus dan respon yang cepat serta memberikan solusi efektif. Memastikan aplikasi penilaian kinerja perangkat daerah menggunakan teknologi yang sesuai dan dapat diandalkan, menjaga keamanan data, kecepatan dan ketersediaan aplikasi demi kelancaran kegiatan. Selain hal yang telah disebutkan diatas perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala dan penyusunan rencana perubahan yang terstruktur dan komprehensif yang mana memetakan langkah perbaikan, alokasi sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan yang realistis.

4. PEMBELAJARAN MENYENANGKAN BERBASIS PENGALAMAN LAPANGAN ANAK (PEMBELA)

4.1 Deskripsi Inovasi

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Selanjutnya pada Pasal 28B Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan pada Pasal 28 C Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya berdasarkan UU RI Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pada peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Dengan dasar hukum tersebut sebagai acuan dasar dalam pengembangan pola pembelajaran melalui inovasi pada pola pembelajaran yang menyenangkan di PAUD Islam Terpadu Permata Hati, program kegiatan inovasi tersebut dikuatkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan tentang Penetapan Program Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Pengalaman Lapangan Anak (Pembela) pada PAUD Islam Terpadu Permata Hati Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.

Perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas PAUD di Indonesia dari tahun ke tahun sudah terjadi peningkatan, baik dalam hal bantuan biaya operasional lembaga PAUD, pelatihan guru PAUD, maupun dari segi kebijakan kebijakan lainnya.

Pada bidang pendidikan PAUD, masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan sehingga perlunya peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan, kompetensi guru dan sarana prasarana. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk direspon oleh lembaga PAUD dan para pendidik dan tenaga kependidikan untuk membuat kualitas layanan pendidikan yang lebih baik.

Pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan melalui PAUD Islam Terpadu Permata Hati menginisiasi program pembelajaran menyenangkan untuk peserta didik dengan nama program Pembela (Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Lapangan Anak) untuk membuat layanan pendidikan yang lebih berkualitas pada anak usia dini (PAUD).

Perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas PAUD di Indonesia dari tahun ke tahun sudah terjadi peningkatan, baik dalam hal bantuan biaya operasional lembaga PAUD, pelatihan guru PAUD, maupun dari segi kebijakan kebijakan lainnya. Pada bidang pendidikan PAUD, masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan sehingga perlunya peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan, kompetensi guru dan sarana prasarana. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk direspon oleh lembaga PAUD dan para pendidik dan tenaga kependidikan untuk membuat kualitas layanan pendidikan yang lebih baik.

Pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan melalui PAUD Islam Terpadu Permata Hati menginisiasi program pembelajaran menyenangkan untuk peserta didik dengan nama program Pembela (Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Lapangan Anak) untuk membuat layanan pendidikan yang lebih berkualitas pada anak usia dini (PAUD).

Permasalahan pembelajaran dalam Lembaga PAUD masih banyak yang cenderung berorientasi pada guru dan terkesan monoton, sehingga peserta didik cepat bosan atau kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, banyak kegiatan pembelajaran yang hanya terfokus pada beberapa aspek perkembangan saja, tidak mengembangkan seluruh aspek perkembangan yang 6, aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa dan seni. Permasalahan lain juga muncul dari penerapan metode atau strategi pembelajaran. Masih sangat perlu menghidupkan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan kontekstual. Permasalahan yang terjadi pada PAUD Islam Terpadu Permata Hati adalah peserta didik kurang antusias saat pembelajaran di ruang kelas, hal tersebut juga dipengaruhi dari suasana ruang belajar atau kelas yang monoton dan kurang memiliki daya tarik bagi usia peserta didik. Pada saat proses

kegiatan pembelajaran berlangsung juga dirasa kurang menyenangkan karena peserta didik terbatas dalam mengeksplorasi berbagai macam media yang membuat pengalaman peserta didik terbatas.

Kualitas pendidikan Indonesia secara global berada dibawah Filipina (81%) dan Etiopia (79%). Sebuah penelitian mengatakan pada urutan pertama ditempati oleh Inggris (87%) dan Australia (83%). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satu diantaranya adalah factor kualitas atau kompetensi guru pengajar. Di Indonesia kualitas atau kompetensi guru masih rendah, berdasarkan hasil uji kompetensi guru pada tahun 2016 menunjukan nilai dibawah standar. Berdasarkan hal tersebut maka Direktorat PAUD 2020-2024 mengarahkan beberapa kebijakan dan strategi, salah satu kebijakan dan strategi yang berkaitan melalui penguatan kebijakan PAUD yang berpusat kepada anak dengan mengembangkan standar capaian belajar yang menitik beratkan pada kreativitas anak.

Sebelum adanya program inovasi Pembela ini proses pembelajaran hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja terutama di dalam ruang kelas. Metode pembaharuan pada inovasi pada program Pembela (Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Pengalaman Lapangan Anak), pendidik mengajak peserta didik belajar ke suatu tempat untuk merasakan pengalaman langsung agar lebih mudah dipahami dan tentunya merasa senang dengan tempat tersebut. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah berjalan selama 2 tahun terakhir, kemudian menyusun program ke depan agar kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Oleh karena itu, PAUD Islam Terpadu Permata Hati kemudian menyusun program agar lebih menarik dan menyenangkan supaya peserta didik ingin mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan.

Melalui program Pembela (Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Pengalaman Lapangan Anak) diharapkan dapat menambah minat anak dalam belajar, sehingga kompetensi anak bisa dikembangkan lebih maksimal. Kegiatan pada program menjadi pilihan terbaik untuk membuat peserta didik ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Pada program Pembela (Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Pengalaman Lapangan Anak), pendidik mengajak peserta didik belajar ke suatu tempat untuk merasakan pengalaman langsung agar lebih mudah dipahami dan tentunya merasa senang dengan tempat tersebut.

Penerapan pembelajaran pada PAUD Islam Terpadu Permata Hati masih berfokus di dalam ruangan/ kelas. Sehingga peserta didik sering merasa bosan dan kurang bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran yang monoton tersebut. Metode pembelajaran yang digunakan oleh para pendidik juga masih belum bervariasi, lebih dominan kepada rangsangan pada kemampuan kognitif anak. Sangat jarang mengajak peserta didik untuk merasakan secara langsung untuk melihat lokasi atau hal yang dipelajari.

Perubahan yang dihasilkan/dicapai setelah berjalannya program Pembela (Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Lapangan Anak) adalah:

1. Peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dilaksanakan
2. Tempat kegiatan pembelajaran yang berbeda membuat peserta didik merasa senang
3. Pendidik dapat memberikan pengalaman baru kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan
4. Capaian perkembangan peserta didik dapat dicapai sesuai harapan

Keunggulan atau kebaruan dari program Pembela (Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Lapangan Anak) adalah pendidik dapat memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan terhadap peserta didik. Keunggulan atau kebaruan lain adalah peserta didik juga mendapatkan pengalaman baru yang lebih bermakna dalam proses pembelajaran yang berlangsung, sehingga dapat lebih melekat dalam ingatannya.

Tahapan inovasi program Pembela adalah sebagai berikut:

1. Para pendidik merancang kegiatan pembelajaran (tema) untuk peserta didik
2. Mengatur panitia pelaksana kegiatan program Pembela di PAUD untuk memudahkan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan
3. Menentukan kegiatan, waktu dan lokasi dari pembelajaran lapangan untuk peserta didik
4. Berkoordinasi dengan pihak tempat yang akan diadakan kegiatan
5. Mengatur keperluan untuk kegiatan seperti perlengkapan acara, akomodasi untuk transportasi peserta didik dan hal lainnya untuk menunjang kelancaran kegiatan
6. Menyampaikan informasi kegiatan kepada peserta didik dan orang tua
7. Pendidik mendampingi peserta didik menuju tempat kegiatan
8. Melaksanakan kegiatan pembelajaran lapangan di tempat sesuai dengan yang telah direncanakan
9. Setelah kegiatan selesai, peserta didik dibawa kembali ke sekolah didampingi oleh para pendidik
10. Pendidik menanyakan perasaan peserta didik setelah kegiatan

Tujuan program Pembela (Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Lapangan Anak) adalah untuk menciptakan program pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi untuk membuat peserta didik kembali aktif dalam kegiatan pembelajaran dan juga selalu merasa senang. Kegiatan pembelajaran peserta didik menjadi lebih menarik dan menyenangkan dan membuat peserta didik kembali aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan serta merasa senang dengan pengalaman yang telah dirasakannya setelah kegiatan tersebut.

Hasil dari implementasi inovasi PEMBELA adalah adanya program pembelajaran yang baru dan dapat membuat kegiatan peserta didik lebih menyenangkan. Aspek perkembangan peserta didik dapat dikembangkan lebih maksimal dengan pengalaman lapangan yang didapatkan.

4.2 Data Perubahan

Tabel 7. Data Perubahan pasca implementasi Inovasi PEMBELA

Indikator	Deskripsi Perubahan
Jumlah penerima manfaat inovasi PEMBELA	207 anak, yang terdiri dari 121 anak laki-laki dan 86 anak perempuan sebagai penerima manfaat peserta didik tahun pelajaran 2022-2023
Metode pembelajaran PAUD	Sebelumnya metode pembelajaran PAUD terdiri dari metode cerita, bernyanyi, seni dan kreativitas, permainan edukatif, media teknologi yang mana banyak dilakukan di dalam kelas/ruangan. diperkenalkan juga metode berbasis lapangan/ PANDAWA ini siswa diperkenalkan langsung melihat/ mengamati langsung, merasakan, mencoba melakukan peran/tindakan sesuai tema pembelajaran lapangan.
Jumlah peserta didik/ murid TK (negeri dan swasta) di Kabupaten Balangan	Inovasi pembelajaran menyenangkan berbasis lapangan (PEMBELA) yang diterapkan secara tidak langsung meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini meningkat. Sebagaimana diketahui jumlah jumlah siswa/ murid TK swasta dan negeri di Kabupaten Balangan tahun 2020/2021 adalah sebanyak 4.537 anak, sedangkan tahun 2022 adalah sebanyak 4.303 anak. Terdapat pengurangan jumlah siswa di TK Kecamatan Halong. Namun secara tren selama beberapa tahun terakhir jumlah siswa TK mengalami peningkatan karena kesadaran dari orang tua pentingnya pemberian pendidikan usia dini sebagai persiapan bagi pendidikan dasar.
Indeks Pembangunan Manusia	Kualitas pendidikan menjadi salah satu penyumbang meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), selain komponen kesehatan dan ekonomi. IPM Kabupaten Balangan tahun 2020 adalah 68,82, tahun 2021 meningkat menjadi 69,11, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 69,73. Secara lebih spesifik dari unsur pendidikan yakni harapan lama sekolah kabupaten Balangan meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni 12,46; 12,47; dan 12,61.
Feedback/ umpan balik dari orang tua siswa	Kegiatan pembelajaran berbasis lapangan PEMBELA belum pernah dilakukan pengukuran secara khusus melalui penyebaran angket SKM/ <i>google form</i> terhadap penerima manfaat inovasi, namun terdapat video testimoni dari orang tua murid. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perubahan perilaku, minat belajar, dan apresiasi terhadap inovasi pembelajaran dapat memberikan gambaran tentang perubahan pasca implementasi inovasi PANDAWA.

Sumber : Hasil Analisis, tahun 2022

4.3 Analisis Dampak

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan diantaranya adalah merangsang perkembangan kognitif, termasuk kemampuan berpikir, memecahkan masalah, mengamati, mengingat dan mengomunikasikan ide-ide; mengembangkan keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca dan menulis; membantu anak memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan sosial yang sehat, dan belajar bekerjasama; mengembangkan motorik kasar (gerak fisik, berjalan, berlari, melompat) dan motorik halus (menulis dan menggunakan alat tulis lain); merangsang kreativitas melalui bermain, seni, musik dan kegiatan lain; dan sebagai persiapan mendapatkan pendidikan formal di tingkat berikutnya. Pendidikan PAUD melalui kegiatan belajar dengan bermain secara aktif dan menyenangkan.

Implementasi inovasi pembelajaran anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) PEMBELA dapat menghasilkan beberapa perubahan dan manfaat signifikan diantaranya adalah :

1. **Pengalaman pembelajaran yang lebih menyenangkan**, karena dengan memanfaatkan lingkungan luar ruangan, seperti taman, kebun, atau tempat bermain, tematik profesi, dll anak-anak PAUD dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Dapat berinteraksi langsung dengan alam, mempelajari tanaman, hewan, fenomena alam, belajar menjalani profesi secara langsung. Hal ini menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam dan disukai anak-anak.
2. **Pengembangan keterampilan motorik kasar**, karena inovasi PEMBELA dapat mendorong pengembangan keterampilan motorik kasar pada anak-anak PAUD. Melalui kegiatan fisik di luar ruangan, seperti berlari, melompat, atau mengikuti rintangan, anak-anak dapat mengembangkan kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi tubuh mereka. Ini akan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan motorik kasar yang penting dalam kehidupan sehari-hari.
3. **Peningkatan keterlibatan dan motivasi**, dimana inovasi tersebut dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi anak-anak PAUD. Mereka lebih termotivasi untuk belajar karena lingkungan yang menarik dan menantang. Anak-anak memiliki kesempatan untuk menjelajahi, menemukan, dan mencoba hal-hal baru. Hal ini dapat mendorong rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar lebih lanjut.
4. **Peningkatan koneksi antar materi**, karena memungkinkan anak-anak PAUD untuk menghubungkan konsep-konsep pembelajaran dengan dunia nyata. Mereka dapat mengamati, menyentuh, dan merasakan objek-objek yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, mereka dapat mempelajari tentang tumbuhan dengan mengamati langsung tanaman

di kebun atau mempelajari tentang binatang dengan mengunjungi kebun binatang. Ini membantu mereka dalam memahami dan mengaitkan pelajaran dengan pengalaman nyata.

5. **Peningkatan kemampuan sosial**, inovasi PEMBELA dapat meningkatkan kemampuan sosial anak-anak PAUD. Mereka memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dalam situasi yang berbeda-beda. Ini membantu dalam mengembangkan keterampilan sosial, seperti berbagi, bekerja sama, berkomunikasi, dan memecahkan masalah bersama. Mereka juga belajar menghargai keberagaman dan menjalin hubungan sosial yang positif.
6. **Penghargaan terhadap alam dan lingkungan**, dimana akan mengembangkan sikap peduli terhadap alam, lingkungan, dan keberlanjutannya. Ini menciptakan kesadaran lingkungan sejak dini dan membangun landasan yang kuat untuk menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan di masa depan.

Dalam keseluruhan, implementasi inovasi pembelajaran anak PAUD berbasis lapangan dapat membawa perubahan positif dalam pengalaman belajar anak-anak. Mereka dapat menikmati pembelajaran yang lebih menarik, mengembangkan keterampilan motorik, terlibat secara aktif, menghubungkan pelajaran dengan dunia nyata, meningkatkan kemampuan sosial, dan menghargai lingkungan sekitar mereka.

Untuk mengukur keberhasilan inovasi pembelajaran anak PAUD berbasis kegiatan lapangan, anda dapat menggunakan beberapa metode dan indikator berikut:

1. Melaksanakan observasi langsung terhadap anak-anak selama kegiatan pembelajaran di lapangan. Meninjau tingkat keterlibatan mereka, minat mereka terhadap materi pembelajaran, partisipasi dalam kegiatan, dan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari.
2. Melaksanakan evaluasi kualitatif, yakni dengan melakukan wawancara atau diskusi dengan anak-anak, guru, dan orang tua untuk mendapatkan *feedback* tentang pengalaman pembelajaran mereka. Pertanyaan yang relevan dapat mencakup sejauh mana mereka merasa terlibat, kesenangan dalam belajar di lapangan, dan apakah mereka dapat menghubungkan pelajaran dengan pengalaman nyata.
3. Melakukan pengukuran dengan melaksanakan tes pengetahuan secara tertulis atau lisan. Tes ini harus dirancang untuk mengukur pemahaman mereka tentang materi pembelajaran dan kemampuan mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Teknik ini dilaksanakan oleh pelaksana inovasi dan dilaporkan sebagai laporan monev kegiatan inovasi.

4. Membuat portofolio anak-anak yang mencakup karya-karya atau proyek yang mereka lakukan selama kegiatan pembelajaran di lapangan. Portofolio dapat berisi foto, catatan, sketsa, atau dokumen lain yang menunjukkan perkembangan mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari.
5. Mengumpulkan umpan balik dari orang tua atau wali murid tentang pengalaman pembelajaran anak mereka melalui penyampaian angket. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perubahan perilaku, minat belajar, dan apresiasi terhadap inovasi pembelajaran dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan inovasi.
6. Memonitor/ memantau tingkat partisipasi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran di lapangan. Jika partisipasi mereka meningkat dan mereka secara aktif terlibat dalam kegiatan, ini bisa menjadi indikator keberhasilan inovasi.
7. Melakukan evaluasi kepada guru untuk mengevaluasi pemahaman mereka tentang metode pembelajaran berbasis lapangan, penerapannya dalam praktik, dan dampaknya terhadap perkembangan anak-anak. Ini dapat dilakukan melalui wawancara, pengamatan pembelajaran, atau survei tertulis.
8. Selain itu, penting juga untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, supervisor pendidikan, dan pengembang kurikulum, dalam proses evaluasi dan pengukuran keberhasilan inovasi pembelajaran. Dengan menggunakan berbagai metode ini, maka dapat dikumpulkan data yang komprehensif untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi inovasi pembelajaran anak PAUD berbasis kegiatan lapangan.

Selama implementasi inovasi pembelajaran menyenangkan anak PAUD berbasis kegiatan lapangan, beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi meliputi:

1. Keterbatasan logistik dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di luar ruangan, yakni mencakup transportasi, kebutuhan peralatan atau materi pembelajaran khusus, serta dukungan dari pihak terkait dalam memfasilitasi kegiatan lapangan. Jika sumber daya terbatas, hal ini dapat menghambat pelaksanaan inovasi dengan baik.
2. Tantangan terkait keamanan dan keselamatan anak-anak, sehingga diperlukan perhatian yang lebih besar untuk memastikan anak-anak berada dalam lingkungan yang aman dan bebas dari bahaya potensial. Juga, perlu ada pengawasan yang memadai dan pengaturan tindakan pencegahan untuk menghindari cedera atau kecelakaan.
3. Ketergantungan pada cuaca dan kondisi lingkungan luar ruangan karena seringkali terjadi perubahan cuaca yang tiba-tiba atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan lapangan. Misalnya, hujan deras atau cuaca yang terlalu panas dapat membuat kegiatan sulit dilakukan atau bahkan harus dibatalkan.

4. Kebutuhan waktu yang lebih lama untuk persiapan dan pelaksanaannya bisa jadi kendala dalam mengelola waktu pembelajaran yang terbatas, terutama jika ada banyak kurikulum atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu. Penjadwalan yang efisien dan perencanaan yang matang perlu dilakukan agar kegiatan tetap berjalan dengan baik.
5. Kendala mengorganisir anak-anak dalam kelompok yang efektif dan menjaga disiplin selama kegiatan di lapangan dapat menjadi tantangan. Anak-anak mungkin menjadi lebih aktif atau teralihkan oleh lingkungan luar ruangan, sehingga membutuhkan pendekatan manajemen kelompok yang lebih terarah untuk menjaga fokus dan partisipasi yang optimal.
6. Perlunya peningkatan keterampilan dan pengetahuan staf dan guru yang terlibat kegiatan berbasis lapangan. Dalam hal ini dibutuhkan pelatihan tambahan atau dukungan dalam merancang dan menyelenggarakan kegiatan lapangan yang bermanfaat. Meningkatkan kompetensi guru dan kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan inovasi ini penting untuk kesuksesan implementasinya.

Sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin dihadapi saat penerapan inovasi PEMBELA, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Perlunya melakukan perencanaan yang teliti dan matang sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan. Identifikasi sumber daya yang diperlukan, termasuk logistik, transportasi, peralatan, dan dukungan pihak terkait. Buat jadwal yang terperinci untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran dan pastikan segala persiapan telah dilakukan dengan baik.
2. Dalam mengatasi permasalahan logistik, keamanan, dan keselamatan, penting untuk melibatkan dan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti orang tua, komunitas lokal, dan mitra eksternal. Dapatkan dukungan mereka dalam menyediakan transportasi, pengawasan, atau bantuan lain yang diperlukan. Kolaborasi yang kuat dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut dengan lebih efektif.
3. Tetapkan aturan dan prosedur yang jelas terkait keamanan dan keselamatan selama kegiatan di lapangan. Pastikan ada pengawasan yang memadai, informasikan anak-anak tentang potensi bahaya, dan berikan instruksi yang jelas tentang tindakan pencegahan yang harus diambil. Pemantauan yang ketat dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar akan membantu mengurangi risiko kecelakaan atau cedera.
4. Persiapkan rencana cadangan atau alternatif jika kondisi cuaca atau lingkungan tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan di lapangan/ faktor fleksibilitas acara. Anda dapat mempertimbangkan aktivitas yang dapat dilakukan di dalam ruangan sebagai pengganti, atau menentukan tanggal dan waktu alternatif untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

5. Menyediakan pelatihan dan dukungan yang diperlukan kepada staf dan guru yang terlibat dalam implementasi inovasi pembelajaran di lapangan. Berikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan lapangan yang efektif. Ini dapat melibatkan pelatihan dalam manajemen kelompok, pengelolaan waktu, komunikasi efektif, dan keterampilan khusus terkait inovasi pembelajaran.
6. Melakukan evaluasi kontinyu dan berkala terhadap implementasi inovasi PEMBELA. Dapatkan umpan balik dari semua pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk anak-anak, orang tua, guru, dan staf. Gunakan umpan balik ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan mencari solusi yang tepat. Juga, lakukan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan dalam rencana dan pelaksanaan inovasi pembelajaran.

5. SISTEM DISPOSISI DIGITAL (SIDIGIT)

5.1 Deskripsi Inovasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas elektronik di lingkungan instansi Pemerintah. Pemerintah mengimbau pada semua instansi pemerintahan untuk Menyusun tata naskah dinas elektronik (sistem informasi administrasi persuratan) masing-masing yang mengacu pada panduan dalam peraturan tersebut. Lebih lanjut Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi pusat maupun pemerintahan daerah. Arsitektur SPBE nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

Salah satu tata naskah dinas yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya Kecamatan Juai adalah disposisi persuratan. Untuk menciptakan efesiensi dan efektifitas, serta mencegah human error tata naskah dinas terutama mengenai lembar disposisi, Bupati Balangan melalui Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah memberikan peluang kepada setiap unit kerja untuk menyelenggarakan inovasi daerah dalam hal tata kelola pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa.

Berdasarkan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam proses administrasi persuratan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan jelas menghimbau semua instansi pemerintah untuk menyusun.

Surat masuk membutuhkan disposisi dari pimpinan, dan seringkali membutuhkan waktu untuk mendapatkan disposisi tersebut, karena ketidakberadaan pimpinan di kantor. Tuntutan tugas mengakibatkan para pimpinan di Kabupaten Balangan harus lebih sering berada dilapangan daripada di kantor, yang berakibat disposisi surat terlambat, kadang seperti undangan tidak bisa menunggu pimpinan berada di kantor, undangan sudah sampai waktu pelaksanaan.

Permasalahan yang melatarbelakangi adalah bahwa surat merupakan salah satu media komunikasi yang sangat penting di suatu instansi, perusahaan maupun organisasi, baik untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar organisasi (eksternal) maupun di dalam organisasi (internal). Hal-hal terkait dengan kegiatan organisasi yang bersifat resmi selalu dikomunikasikan dalam bentuk surat, baik surat edaran, surat keputusan, surat peraturan, surat perintah tugas, surat pendelegasian wewenang, surat undangan rapat, surat permohonan dan berbagai jenis surat lainnya yang kaitannya dengan kegiatan organisasi. Proses pengelolaan surat sekilas dipandang mudah, namun kenyataannya pengelolaan dan efisiensi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara manual bukanlah perkara yang mudah, hal ini disebabkan karena tingginya human error, sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan surat menjadi rendah. Permasalahan yang terjadi ini harus menjadi dasar pertimbangan bagi organisasi dalam pengelolaan surat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam proses administrasi persuratan. Surat masuk membutuhkan disposisi dari pimpinan, hal ini membutuhkan waktu untuk mendapatkan disposisi tersebut. Tingginya mobilitas pimpinan terutama di Kecamatan Juai yang sering kali harus berada di lapangan mengakibatkan keterlambatan disposisi surat-surat masuk.

Surat-surat yang membutuhkan disposisi akhirnya mengalami penundaan untuk ditindaklanjuti sehingga terlambat diterima oleh pejabat yang seharusnya menerima disposisi tersebut. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem berbasis internet untuk memudahkan dalam hal pemberian disposisi yang cepat efektif dan efisien. Kendala-kendala tersebut membuat kantor Kecamatan Juai membuat sebuah aplikasi bernama SIDIGIT (Sistem disposisi digital). Direncanakan dan dibuat sendiri oleh sumber daya manusia (SDM) semuanya dari kantor kecamatan juai Kabupaten Balangan.

Proses pengelolaan surat sekilas dipandang mudah, namun kenyataannya pengelolaan dan efisiensi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara manual bukanlah perkara yang mudah, hal ini disebabkan karena tingginya human error, sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan surat menjadi rendah.

Surat masuk membutuhkan disposisi dari pimpinan, dan seringkali membutuhkan waktu untuk mendapatkan disposisi tersebut, karena ketidakberadaan pimpinan di kantor. Tuntutan tugas

mengakibatkan para pimpinan di Kecamatan Juai harus lebih sering berada dilapangan daripada dikantor, yang berakibat disposisi surat terlambat, kadang seperti undangan tidak bisa menunggu pimpinan berada di kantor, undangan sudah sampai waktu pelaksanaan.

Hal tersebut tentu saja menyulitkan staf administrasi yang menangani persuratan di Kecamatan Juai untuk mendapatkan disposisi surat-surat masuk, karena harus menunggu pimpinan berada di kantor. Surat-surat yang membutuhkan disposisi akhirnya mengalami penundaan untuk ditindak lanjuti sehingga terlambat diterima oleh pejabat yang menerima disposisi tersebut.

Permasalahan administrasi persuratan sering terjadi di Kecamatan Juai. Hal ini menjadikan proses administrasi memerlukan waktu yang lama dan human error. Proses administrasi di Kecamatan Juai masih dilakukan secara manual dalam bentuk kertas. Kondisi tersebut cukup menghambat penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Juai, karena tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Setelah implementasi inovasi perubahan yang dihasilkan/dicapai setelah berjalannya penggunaan Aplikasi SIDIGIT adalah:

1. Pimpinan menjadi lebih mudah untuk memberikan disposisi dimanapun berada.
2. Pejabat yang menerima disposisi mendapat kemudahan sehingga dapat langsung melakukan pekerjaan sesuai disposisi pimpinan.
3. Pekerjaan pengadministrasian surat menjadi lebih efektif dan efisien.

Keunggulan atau kebaruan dari aplikasi SIDIGIT adalah kemudahan dalam menggunakannya. Setiap orang yang memiliki akses google dan aplikasi whatsapp dapat dengan mudah memahami dan menggunakannya serta dapat diakses dimana saja tanpa harus ada di kantor.

Aplikasi SIDIGIT dioperasikan oleh seorang operator, dimana operator ini berperan sebagai kunci untuk meneruskan semua surat masuk untuk di disposisi oleh pimpinan. Adapun tahapan inovasi pada aplikasi SIDIGIT adalah sebagai berikut:

1. Operator Mengisi *google form* surat masuk
2. Mengirimkan link/tautan google form SIDIGIT ke whatsapp pimpinan
3. Pimpinan mengisi *google form* yang telah dikirimkan
4. Operator menerima google form yang sudah di isi dan meneruskannya sesuai dengan disposisi yang diberikan

Tujuan pembuatan SIDIGIT untuk membantu menyelesaikan permasalahan administrasi persuratan yang sering terjadi di Kecamatan Juai, sehingga proses administrasi yang sebelumnya masih menggunakan cara manual dan memakan waktu yang masih digunakan dalam bentuk kertas dan ketika mengalami kesusahan, karena harus menunggu pimpinan dikantor.

Manfaat yang diperoleh dari inovasi SIDIGIT adalah

1. Memberikan kemudahan pimpinan untuk mendisposisi surat-surat masuk kapanpun dan dimanapun berada.
2. Memberikan kemudahan kepada pejabat yang menerima disposisi untuk dapat langsung melakukan pekerjaan sesuai dengan disposisi pimpinan, kapanpun dan dimanapun berada.

Inovasi tersebut menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien karena disposisi bisa cepat dilakukan sehingga pekerjaan bisa langsung ditindaklanjuti oleh penerima disposisi. Tujuan pembuatan SIDIGIT untuk membantu menyelesaikan permasalahan administrasi persuratan yang sering terjadi di Kecamatan Juai, sehingga proses administrasi yang sebelumnya masih menggunakan cara manual dan memakan waktu yang masih digunakan dalam bentuk kertas dan ketika mengalami kesusahan, karena harus menunggu pimpinan dikantor.

Daftar isian *google form* disposisi surat masuk yang harus diisi terdiri dari surat dari; nomor surat; perihal; tanggal surat; tanggal terima surat; nomor agenda; sifat; diteruskan kepada (Sekretaris Camat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Pemerintahan Desa, Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa); catatan camat; scan surat masuk untuk kemudian submit.

5.2 Data Perubahan

Tabel 7. Perubahan Inovasi SIDIGIT

Indikator	Deskripsi Perubahan
Efisiensi dari kecepatan pendisposisian surat masuk	Sebelumnya untuk memperoleh disposisi dari camat terkait surat masuk sampai dengan disampaikan kepada yang bersangkutan memerlukan waktu karena kendala terkadang pimpinan tidak berada di tempat, hal tersebut berdampak pada keterlambatan menghadiri acara, keterlambatan pengumpulan laporan/ data dll. Melalui inovasi SIDIGIT maka pendisposisian surat menjadi lebih mudah, cepat dan praktis menggunakan <i>google form</i> . Dari SOP yang sudah disusun, diinformasikan bahwa dari tahapan penerimaan surat masuk sampai dengan mengarsipkan surat cukup memerlukan waktu paling lama 30 menit. Apabila dibandingkan dengan cara manual yang paling cepat ½ hari karena menunggu kehadiran dari pejabat yang memberi disposisi (camat), terlepas kondisi khusus ketika Camat tidak sedang berada di tempat, waktu yang diperlukan untuk memperoleh disposisi menghadiri/ melaksanakan kegiatan semakin tertunda dan memakan waktu lama. Kecepatan waktu memperoleh disposisi tersebut bermanfaat bagi semakin cepatnya pelaksanaan kegiatan bagi pejabat yang menerima disposisi, berpengaruh juga pada kecepatan penyelesaian pekerjaan dan kinerja instansi. mengukur peningkatan waktu yang dihemat dalam proses disposisi surat masuk.
Jumlah penerima manfaat	Penerima manfaat dianggap sebagai pengguna dari inovasi SIDIGIT, penerima manfaat dari unsur dalam/ internal

Indikator	Deskripsi Perubahan
	Kecamatan Juai adalah sebanyak 11 orang yang terdiri dari Camat, Sekcam, Kasubag Perencanaan, Kasubag Umpeg, Kasi Pelayanan, Kasi PMDK, Kasi Trantibum, Plh Kasi Pemerintahan, Kasi Binwaspemdes, Admin SIDIGIT dan Operator SIDIGIT.
Tingkat adopsi	Indikator ini mengukur tingkat penerimaan dan penggunaan inovasi SIDIGIT oleh pegawai atau pengguna terkait. Dapat diukur dengan mengamati tingkat partisipasi dan penggunaan formulir disposisi oleh pengguna yang dituju. Informasi tingkat adopsi diasumsikan dari jumlah surat masuk dalam rentang tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun bulan September – Desember 2022 (4 bulan) terdapat surat masuk sebanyak 105 surat yang didisposisi dari pengirim yang beragam dari SKPD, instansi pendidikan, desa, dll). Apabila diasumsikan selama 1 tahun terdapat kurang lebih 300 surat yang didisposisi, maka dalam rentang 2021-2022 dihasilkan 600 surat yang sudah didisposisi.
Hasil kepuasan pengguna terhadap inovasi pelayanan SIDIGIT	Hasil analisis yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti Bappedalitbang dihasilkan bahwa dalam 9 unsur pelayanan SIDIGIT nilai rata-rata unsur pelayanan adalah 3,56 dan diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 85,08 yang artinya mutu pelayanan B dan nilai kinerja Baik. Dari laporan SKM tersebut diinformasikan bahwa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan lagi adalah waktu penyelesaian pelayanan dimana masih terdapat 2,2% penerima manfaat berpersepsi pelayanan yang diberikan masih lambat. Sehingga perlu dilakukan a) sosialisasi rutin agar segera melakukan menyalin data pengukuran ke dalam laporan pencatatan, b) petugas diharapkan membuat SOP yang dapat diikuti, c) petugas wajib mengevaluasi hasil pencatatan laporan setiap bulannya. Kedua adalah unsur produk hasil layanan dimana masih terdapat 4,4% responden berpersepsi produk hasil layanan masih tidak sesuai. Sehingga perlu dilakukan perbaikan yakni a) membuat forum bersama kader posyandu dalam wilayah kerja untuk inovasi “SIDIGIT”, b) membuat format yang sederhana dan mudah di pahami
Pengurangan biaya	Sebelum inovasi SIDIGIT, terdapat pembebanan biaya untuk mendapatkan informasi disposisi mengikuti, melaksanakan kegiatan untuk pembelian kertas, cetak buku disposisi, buku agenda, pembelian map, pulpen/ ATK, pengiriman fisik surat, penyimpanan fisik surat, dll. Setelah inovasi SIDIGIT terjadi penghematan biaya yang terkait dengan disposisi surat masuk menggunakan <i>google form</i> , yakni tidak lagi ada pengeluaran terkait tersebut diatas, sehingga terjadi efisiensi biaya.
Kinerja Kecamatan Juai	Secara tidak langsung efisiensi kerja yang dihasilkan dari inovasi SIDIGIT meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Juai dimana sebelumnya Tahun 2021 adalah sebesar 99,87% (sangat tinggi), mengalami peningkatan di Tahun 2022 capaian kinerja menjadi 100% (sangat tinggi).

Sumber : Hasil Analisis, 2022

5.3 Analisis Dampak

Melengkapi informasi manfaat yang diterima dari inovasi SIDIGIT sebagaimana disebutkan diatas, dapat diidentifikasi dampak diterapkannya/ implementasi inovasi disposisi surat secara digital melalui *google form* memberikan dampak positif sebagai berikut :

2. Efisiensi operasional, dimana dengan menggunakan inovasi SIDIGIT yakni disposisi surat masuk digital dengan *google form* dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Proses pengisian, pengiriman, dan pengelolaan disposisi menjadi lebih cepat dan mudah. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menangani surat masuk dan memungkinkan fokus yang lebih besar pada tugas-tugas yang lebih penting.
3. Penghematan biaya, karena SDIGIT dapat mengurangi biaya yang terkait dengan surat fisik, seperti biaya pencetakan, pengiriman, dan pengelolaan surat secara manual. Penggunaan kertas dan bahan kantor juga dapat berkurang, menghasilkan penghematan dalam jangka panjang.
4. Peningkatan akurasi, karena disposisi surat masuk SIDIGIT dapat mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam proses manual. Data yang diisi secara elektronik akan terekam secara akurat, mengurangi risiko kesalahan penyalinan atau penulisan informasi.
5. Akan terjalin kolaborasi yang lebih baik, dimana penggunaan *google form* memungkinkan pembaruan dan informasi disposisi dapat diakses secara real-time oleh semua pemangku kepentingan terkait. Hal ini membantu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar departemen atau individu yang terlibat dalam proses disposisi.
6. Efisiensi pencatatan dan pelacakan, karena data dapat dengan mudah direkam, disimpan, dan dicari melalui formulir digital. Informasi disposisi dapat dilacak dengan cepat, memungkinkan visibilitas yang lebih baik atas status dan kemajuan disposisi.
7. Keamanan dan keberlanjutan, karena *google form* memberikan langkah-langkah keamanan data yang kuat, termasuk enkripsi dan pengelolaan akses yang terbatas. Ini membantu melindungi informasi sensitif yang terkait dengan disposisi surat masuk. Selain itu, dengan mengurangi penggunaan kertas dan limbah fisik, penerapan disposisi surat masuk digital juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.
8. Aksesibilitas dan fleksibilitas, karena SIDIGIT dapat diakses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengisi dan mengelola disposisi surat masuk di mana saja dan kapan saja.

Selain data perubahan tersebut diatas di dalam mengukur keberhasilan implementasi inovasi SIDIGIT dalam mencapai tujuan/ sasaran program dapat melihat indikator sebagai berikut:

1. Akurasi data, karena implementasi ini mampu menggambarkan tingkat keakuratan data yang diisi dalam formulir disposisi surat masuk digital. Dapat diukur dengan memeriksa jumlah kesalahan atau ketidaktepatan data sebelum dan setelah penggunaan *google form*.
2. Kolaborasi dan komunikasi, indikator perubahan inovasi yakni peningkatan dalam kolaborasi dan komunikasi antar SKPD, institusi atau individu yang terlibat dalam proses disposisi surat masuk. Dapat diukur dengan melihat peningkatan dalam pertukaran informasi, responsibilitas, dan kerja tim antara pemangku kepentingan terkait.
3. Keamanan data juga dapat dijadikan indikator keberhasilan implementasi inovasi SIDIGIT, yakni melihat keberhasilan dalam menjaga keamanan data dalam disposisi surat masuk digital menggunakan *google form*. Dapat diukur dengan memastikan implementasi langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti enkripsi data dan pengelolaan akses yang terbatas.
4. Kinerja organisasi, dapat mencerminkan keberhasilan inovasi karena mencerminkan dampak positif yang dihasilkan oleh disposisi surat masuk digital dalam meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, seperti peningkatan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih cepat, atau peningkatan layanan kepada pihak terkait.

Selama implementasi inovasi SIDIGIT, beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan teknis dalam menggunakan *google form* Pengguna yang tidak terbiasa dengan platform ini mungkin mengalami kesulitan dalam membuat atau mengelola formulir disposisi.
2. Resistensi perubahan, dimana individu atau unit kerja mungkin enggan mengadopsi disposisi surat masuk digital/ SIDIGIT karena kenyamanan dengan metode manual yang sudah ada. Mereka mungkin mengkhawatirkan perubahan rutinitas kerja atau mempertanyakan manfaat dari inovasi tersebut.
3. Keterbatasan akses internet, sehubungan pemanfaatan inovasi ini tergantung pada akses jaringan internet yang stabil dan andal. Jika koneksi internet tidak konsisten atau terbatas, hal ini dapat menyebabkan kendala dalam pengisian dan pengelolaan formulir disposisi.
4. Keamanan dan privasi data, sebagian pengguna mungkin merasa khawatir tentang keamanan dan privasi data dalam penggunaan disposisi surat masuk digital. Kekhawatiran ini dapat menghambat adopsi inovasi jika langkah-langkah keamanan data tidak jelas atau dirasakan sebagai risiko potensial.

5. Integrasi dengan sistem atau proses yang ada, dimana perlunya diintegrasikan dengan sistem atau proses yang sudah ada, dapat timbul tantangan teknis dalam menghubungkan dan mengalirkan data di antara sistem-sistem yang berbeda.
6. Membutuhkan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk memahami dan menggunakan disposisi surat masuk digital dengan *google form*. Jika tidak ada pelatihan yang memadai atau dukungan teknis yang disediakan, pengguna mungkin kesulitan mengadopsi inovasi tersebut.
7. Kompleksitas formulir dan alur disposisi. Karena formulir disposisi atau alur disposisi yang diimplementasikan tidak dirancang dengan baik, dapat menyebabkan kebingungan atau kesulitan bagi pengguna dalam mengisi atau mengelola disposisi surat masuk.
8. Penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan tersebut dengan melibatkan pengguna, memberikan pelatihan yang memadai, menyediakan dukungan teknis yang memadai, dan memastikan keamanan data yang memadai. Dengan penanganan yang tepat, permasalahan tersebut dapat diatasi dan inovasi SIDIGIT dapat diimplementasikan dengan sukses.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan implementasi inovasi SIDIGIT, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan dan sosialisasi
Memberikan pelatihan kepada pengguna terkait mengenai penggunaan *google form* dan disposisi surat masuk digital secara menyeluruh. Sosialisasikan manfaat dan cara penggunaan yang efektif melalui sesi pelatihan, materi dokumentasi, atau tutorial video.
2. Dukungan teknis
Sediakan dukungan teknis yang memadai bagi pengguna selama proses implementasi. Tim dukungan dapat membantu dalam mengatasi kendala teknis, memberikan bimbingan dan solusi bagi pengguna yang menghadapi kesulitan, serta memberikan respons yang cepat terhadap pertanyaan atau masalah yang muncul.
3. Komunikasi dan partisipasi aktif
Libatkan pengguna dalam proses implementasi dengan mendengarkan umpan balik mereka. Ajak mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pengujian awal formulir disposisi, sehingga mereka merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keuntungan yang akan diperoleh dari inovasi ini.
4. Penanganan keamanan dan privasi data
Pastikan langkah-langkah keamanan dan privasi data yang memadai telah diterapkan dalam disposisi surat masuk digital menggunakan *google form*. Jelaskan kebijakan dan prosedur yang

ada untuk melindungi informasi sensitif, sehingga pengguna merasa lebih percaya diri dan yakin dalam menggunakan inovasi ini.

5. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas

Jika masalah terkait keterbatasan akses internet menjadi kendala, upayakan untuk meningkatkan infrastruktur atau menyediakan alternatif akses yang lebih stabil, seperti memastikan koneksi internet yang handal atau menyediakan akses melalui jaringan internal yang dapat diandalkan.

6. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

Lakukan evaluasi berkala terhadap implementasi disposisi surat masuk digital menggunakan *google form*. Identifikasi permasalahan yang muncul dan cari solusi yang tepat. Terus tingkatkan formulir dan proses disposisi berdasarkan umpan balik dan kebutuhan pengguna.

7. Pendekatan bertahap

Lakukan implementasi disposisi surat masuk digital secara bertahap dan piloting. Dengan memulai dengan kelompok pengguna yang lebih kecil atau departemen tertentu, Anda dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan dengan lebih efektif sebelum mengimplementasikan secara luas ke seluruh organisasi.